



PEMERINTAH KOTA BIMA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)**

2021



PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

JL. Soekarno-Hatta No. 02 Raba-Bima Tlp. (0374) 646442 Fax. (0374) 646569

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA
TAHUN 2019-2023

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 perlu disusun perubahan Rencana Strategis 2018-2023, setiap satuan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menyelaraskan Rencana Strategis tahun 2019-2023 agar sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga Kota Bima Tahun 2018-2023;
 7. Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA KOTA BIMA TAHUN 2018-2023.
- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raba - Bima
Pada Tanggal 21 Maret 2021
KEPALA BAPPEDA LITBANG,



Drs. H. MUHAMMAD FAKHRUNRAJI, M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680828 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada

- Yth: 1. Walikota Bima di Raba;
2. Inspektur Inspektorat Kota Bima di Raba;
3. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba;

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Bima Periode 2019 – 2023 dilakukan seiring dengan dilakukannya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima untuk merespon perubahan nomenklatur dan kodefikasi program dan kegiatan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Renstra ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang untuk 3 (tahun) tahun kedepan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Renstra Bappeda Litbang di susun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Periode sebelumnya. Analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*Stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal maupun nasional.

Akhirnya Renstra Bappeda Litbang sebagai dokumen perencanaan dapat menjadi panduan dan komitmen semua pihak lingkup Bappeda Litbang agar tujuan dan sasarannya organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kepala Bappeda Litbang
Kota Bima



Drs. H Muhammad Fakhrunraji, ME

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
HALAMAN SAMBUNG	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	49
3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas	60
3.4 Telaahan terhadap Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB	64
3.5 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031	66
3.6 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis	75
3.7 Analisis Isu-Isu Strategis	78
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	80
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	80
4.2 Definisi Operasional Indikator dan cara pengukuran kinerja	82
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	85

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	88
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	118
BAB VIII	PENUTUP	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki pengaturan khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh karena perencanaan pembangunan pada hakekanya memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing melalui rangkaian proses yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk mencapai keseimbangan.

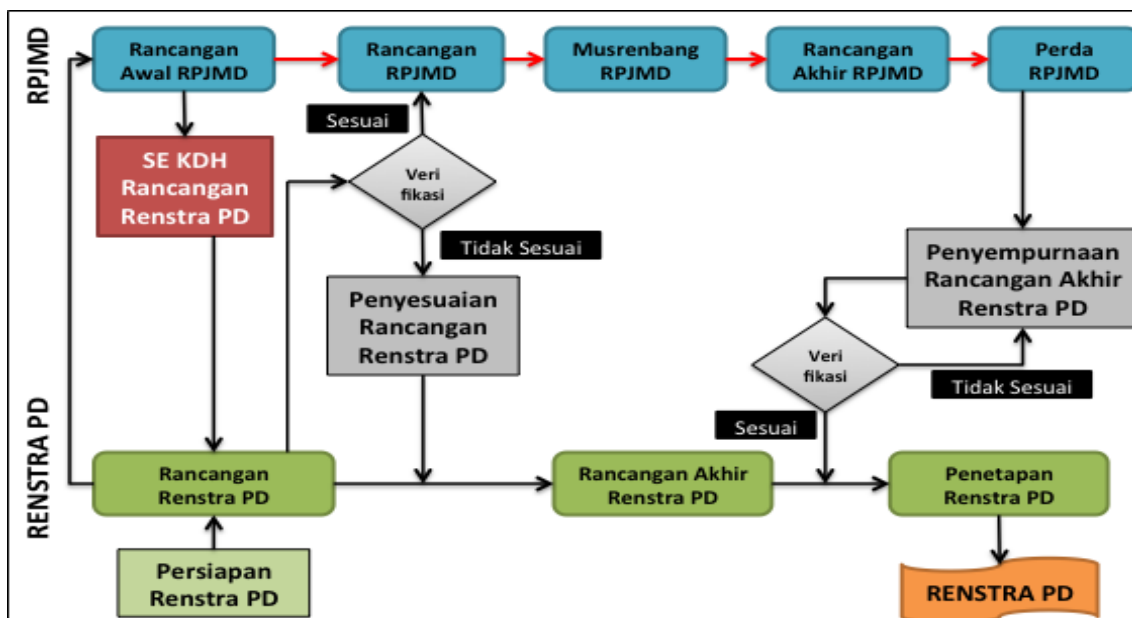
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1), dinyatakan bahwa *“Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD”*, dan Ayat (2) menyatakan bahwa *“Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”* Dengan demikian setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab untuk menjamin adanya konsistensi dan keselarasan perencanaan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Bima selaku Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan harus menyusun dokumen Renstra sebagai penjabaran RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023 serta menjadi dasar penetapan perjanjian kinerja Kepala Bappeda Litbang kepada Walikota Bima. Lebih lanjut Renstra Bappeda Litbang Kota Bima akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi tolak ukur capaian kinerja selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun proses penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Bima mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Bima;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Bappeda Litbang Kota Bima;
3. Penyusunan rancangan Renstra Bappeda Litbang Kota Bima;
4. Perumusan rancangan akhir Bappeda Litbang Kota Bima; dan
5. Penetapan Renstra Bappeda Litbang Kota Bima.

Secara lebih jelas bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Bima dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini.



Gambar 1.1.
Proses Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Bima 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra ini, Bappeda Litbang Kota Bima diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis RPJMD Kota Bima untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pada penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 354);

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
3. Sebagai acuan untuk dalam membangun persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bima;
4. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Bappeda Litbang Kota Bima sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
5. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kota Bima dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
6. Sebagai indikator kinerja utama dan indicator kinerja kunci keberhasilan Bappeda Litbang Kota Bima dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Walikota dan Walikota terpilih

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Untuk menjabarkan program pembangunan pada RPJMD ke dalam kegiatan pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

2. Untuk menjadi pedoman penetapan indikator kinerja utama Bappeda Litbang dan menjadi dasar perjanjian kinerja Kepala Bappeda Litbang kepada Walikota;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) dan RKA Bappeda Litbang Kota Bima setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bappeda Litbang Kota Bima; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bappeda Litbang Kota Bima.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018-2023 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG KOTA BIMA

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Bappeda Litbang Kota Bima.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi dan program Walikota Kota Bima periode 2018-2023, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Bappeda Litbang Kota Bima dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan Bappeda Litbang Kota Bima.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018-2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018-2023 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Bima tercantum dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG KOTA BIMA

Gambaran pelayanan Bappeda Litbang Kota Bima selama periode sebelumnya diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Bappeda Litbang tahun 2018-2023 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Gambaran pelayanan Bappeda Litbang Kota Bima selama periode 2014-2018 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas Renstra periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada periode lima tahun yang akan datang.

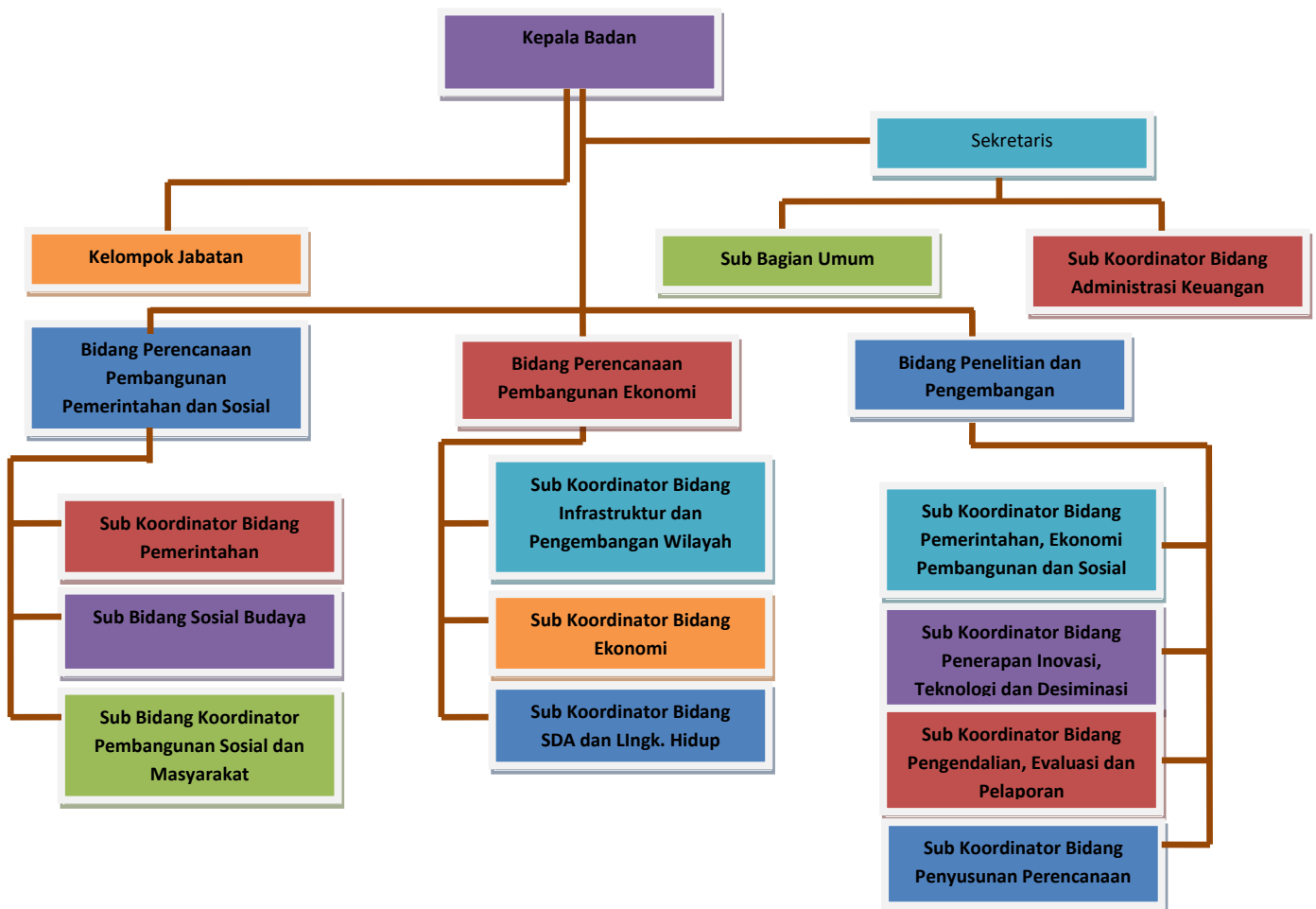
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Bappeda Litbang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bima nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima serta Peraturan Walikota Bima nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Koordinator Bagian Administrasi Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial, terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
 - b. Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - b. Sub Koordinator Bidang Ekonomi
 - c. Sub Koordinator Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
- Sub Koordinator Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Sosial
 - Sub Koordinator Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan
 - Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - Sub Koordinator Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Bagan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Bima adalah sebagaimana ditunjukkan berikut ini.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2022



Sumber: Peraturan Walikota Bima nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara

vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan tugas pokok Bappeda Litbang adalah menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Badan mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi;
2. Penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan;
3. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
4. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
6. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah secara makro;
7. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ);
8. Pelaksanaan program kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Penyiapan potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah serta pengembangan peraturan Perundang-undangan;
9. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah, pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah serta keserasian

pembangunan daerah sesuai manajemen pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah;

10. Pengoordinasian kegiatan Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

A. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;
2. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ASN; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Umum; dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Bidang Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Koordinator Bidang Administrasi Keuangan mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
 3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 4. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik lingkup Bappeda Litbang;
 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Bappeda Litbang ;
 7. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 8. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

9. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
 - b. verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan sosial;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan sosial;
 - g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
 - j. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial terdapat 2 (dua) Sub Koordinator Bidang, yaitu:
 - a. Sub Koordinator Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Bidang yang mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas, Sub Koordinator Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
 2. Analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Urusan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
 3. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
 4. Perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, DPRD dan Kecamatan;
 5. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
 6. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
 7. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas,

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan Pembangunan Manusia dan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
2. Pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
3. Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
4. Perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
5. Perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
6. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;

7. Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
8. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Infrastruktur, Ekonomi dan SDA serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, PJMD, dan RKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - b. Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - c. Pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - d. Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - e. Pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;

- f. Pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - g. Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - h. Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - i. Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - k. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 2. Penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;

3. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
 4. Pelaksanaan pengkajian dan telaah usulan RKA-SKPD bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan antara Rencana Kegiatan SKPD dengan Renstra SKPD, skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, visi dan misi Walikota serta RPJMD Kota;
 5. Penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 7. Penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka penyusunan LAKIP;
 8. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Koordinator Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 2. Analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman

- Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
3. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJP, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 4. Perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 5. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 6. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 7. Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 8. Perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 9. Penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dalam rangka penyusunan LAKIP;
 10. pendelegasian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi;
 11. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang ekonomi; dan
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Bidang SDA dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang SDA dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Koordinator Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah berdasarkan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;
2. Penyusunan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup dalam rangka penyusunan LAKIP;
8. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang SDA dan lingkungan Hidup;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan, merumuskan

kebijakan, mensosialisasikan, mengevaluasi, monitoring dan menyampaikan laporan di bidang pemerintahan umum dan Pengkajian Peraturan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Penerapan dan inovasi teknologi serta Diseminasi kelitbangan.

2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
- b. penyusunan dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi, serta Desiminasi Kelitbangan;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pemerintahan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, di bidang sosial dan kependudukan, di bidang ekonomi dan pembangunan, di bidang penerapan dan Inovasi Teknologi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan terdapat 4 (empat) Sub Koordinator Bidang, yaitu:

- a. Sub Koordinator Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Koordinator Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi:

1. membantu kepala Bidang dalam perumusan rencana program kerja tahunan sub bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;

2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi. Pembangunan dan sosial;
 3. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, perlindungan masyarakat, perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, Penanaman modal, koperasi, UKM, badan usaha milik daerah, sumber daya alam, pengembangan wilayah fisik dan prasarana, dan sosial, pemberdayaan perempuan, pendidikan kebudayaan serta pariwisata;
 4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi. pembangunan dan sosial; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Koordinator Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan mempunyai fungsi:
1. perumusan rencana program kerja tahunan pada Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Penerapan teknologi dan inovasi serta desiminasi kelitbangan meliputi aspek-aspek antara lain; uji coba, penerpan rancang bangun/model, replikasi, penerapan teknologi, dan perekayasaan di bibidang teknologi serta memfasilitasi hak kekayaan intelektual;

4. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
1. Perumusan rencana program kerja tahunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 3. Menyiapkan bahan evaluasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum, kependudukan serta informasi dasar kewilayahan;
 4. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan pemerintah daerah;
 5. Menyiapkan bahan penyelenggaraan forum litbang, forum perencanaan dan forum evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah;
 6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Sub Koordinator Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan merencanakan pendanaan kegiatan perencanaan pembangunan, dan penyiapan bahan pendanaan kegiatan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Koordinator Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:
1. Perumusan rencana program kerja tahunan Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
3. Menyiapkan bahan mengenai Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD;
4. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis sebagai implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut diatas, Bappeda Litbang Kota Bima saat ini memiliki pegawai yang secara kuantitas dapat dikatakan cukup memadai yaitu sejumlah 36 (tiga puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian sebagai berikut:

A. Berdasarkan Golongan terdiri dari:

1. Golongan IV : 5 (lima) orang
2. Golongan III : 28 (dua puluh delapan) orang
3. Golongan II : 2 (dua) orang

B. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari 16 (enam belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Eselon II b : 1 (satu) orang, yaitu Kepala Badan
2. Eselon III a : 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Badan
3. Eselon III b : 3 (tiga) orang, terdiri dari Kabid.

4. Eselon IV a : 1 (satu) orang, terdiri atas satu (satu) orang kasubbag
10 (sepuluh) orang Sub Koordinator.
5. Pejabat Fungsional : 2 (dua) orang

C. Staf terdiri atas 17 (tujuh belas) orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas :

1. Strata 2 (S2) : 11 (sebelas) orang
2. Strata 1 (S1) : 21 (dua puluh satu) orang
3. Sarjana Muda : 1 (satu) orang
4. SLTA : 2 (dua) orang

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2022, keadaan pegawai pada Bappeda Litbang Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S3	-	-
2.	S2	11	31.43%
3.	S1	21	60.00%
4.	Diploma 3	1	2.86%
5.	SMA / sederajat	2	5.71%
Total		35	100%

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	5	14.29%
2.	Golongan III	28	80.00%
3.	Golongan II	2	5.71%
Total		35	100%

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	2.86%
2.	Eselon III	4	11.43%
3.	Eselon IV	11	31.43%
4.	Non-Eselonering	19	54.29%
Total		35	100%

Fasilitas perkantoran yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Meubeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer, plotter, dan server;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin ketik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari, *air conditioner* (AC), *dispenser*, kipas angin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2014-2018 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2014-2018.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini mengulas capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2014-2018 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2014-2018. Capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Bima secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase ketersediaan elemen data perencanaan pembangunan dalam SIPD		60%	-	100%	100%	100%	100%	100%	54%	67%	78%	47%	51%	54%	67%	78%	47%	
2.	Persentase Program RPJMD yang ditindaklanjuti dalam RKPD		82%	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	78%	80%	80%	80%	80%	78%	80%	80%	80%
3.	Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD		85%	-	100%	100%	100%	100%	100%	63%	71%	70%	73%	77%	63%	71%	70%	73%	77%
4	Persentase dokume Renja yang disusun sesuai dengan ketentuan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	60%	90%	90%	50%	50%	60%	90%	90%
5	Ketersediaan dokumen RPJMD		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Ketersediaan dokumen RKPD dan RKPD Perubahan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	100%	100%	50%	50%	50%	100%	100%
7	Persentase pelaksanaan musrenbang (kelurahan+kecamatan+kota) yang tepat waktu		100%		100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	70%	78%	83	70%	70%	70%	78%	83
8	Tingkat partisipasi perempuan dalam forum musrenbang				30%	30%	30%	30%	30%	27%	27%	27%	28%	28%	27%	27%	27%	28%	28%
9	Ketersediaan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota secara digital				100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Persentase dokumen laporan capaian kinerja RKPD dan Renja yang disajikan tepat waktu setiap triwulan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	30%	36%	45%	74%	92%	30%	36%	45%	74%	92%
11.	Ketersediaan dokumen evaluasi capaian kinerja RKPD dan RPJMD setiap tahun		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	0	0	0	100%	100%
12.	dokumen penelitian dan pengembagn yang dihasilkan		10	-	10%	20%	30%	40%	50%	-	10%	10%	40%	40%	0	10%	10%	40%	40%
13	Nilai LAKIP			-	C	CC	B	B	BB	C	C	C	B	B	C	C	C	B	B

Sumber: Hasil Analisa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja Bappeda Litbang Kota Bima selama periode 2014-2018 menunjukkan pencapaian yang baik. Secara spesifik capaian IKK dari tiap indikator kinerja walaupun tidak sesuai dengan target, dari tahun ke tahun menunjukkan progresivitas peningkatan yang baik untuk pencapaian target. Ini menunjukkan bahwa kinerja Bappeda Litbang merealisasikan setiap target IKK sudah dijalur yang tepat dalam pencapaian sasaran SKPD.

2.3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2014 Bappeda Litbang Kota Bima mendapatkan alokasi pagu belanja langsung sebesar Rp 5,210,536,440.00 (lima milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan belanja tak langsung sebesar Rp 2,623,072,794.00 (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan jumlah total alokasi pagu belanja sebesar Rp 7,833,609,234 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu tiga rupiah).

Pada tahun 2014 hingga 2018 total pagu belanja Bappeda Litbang Kota Bima berkisar di angka Rp 8,827,933,003 (delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah). Sementara rasio realisasi belanja Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2014 sebesar 95,55%. Rasio realisasi belanja terbesar selama kurun waktu 2014-2018 terjadi pada tahun 2017 dengan rasio sebesar 98,95% dan rasio realisasi belanja terkecil pada tahun 2018 yang hanya sebesar 85,93%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi pelayanan Bappeda Litbang Kota Bima menurut kelompok belanja dan jenis belanja selama kurun waktu tahun 2014-2018 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA LITBANG Tahun 2014 – 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
BELANJA DAERAH	7,833,609,234	8,173,757,145	8,533,711,518	9,452,360,269	10,146,226,848	7,485,014,079	7,986,735,474	8,366,375,483	9,352,970,767	8,718,644,382	95 55%	97 71%	98 04%	98 95%	85 93%	8,827,933,003	8,381,948,037
Belanja Tak Langsung	2,623,072,794.00	1,884,680,693.00	1,622,687,631.89	2,506,142,468.55	2,658,626,098.10	2,520,641,383.00	2,434,647,866.00	2,402,255,448.00	2,432,084,074.00	2,214,465,995.00	96 36%	96 69%	94 34%	97 04%	64 79%	2,259,041,937	2,400,818,953
Belanja Langsung	5,210,536,440.00	6,289,076,452.00	6,911,023,886.00	6,946,217,800.00	7,487,600,750.00	4,964,372,696.00	5,552,087,608.00	5,964,120,035.00	6,920,886,693.00	6,504,178,387.00	95 21%	98 16%	99 65%	99 64%	82 4%	6,568,891,066	5,981,129,084
PERENCANAAN	5,210,536,440.00	6,289,076,452.00	6,911,023,886.00	6,946,217,800.00	7,487,600,750.00	4,964,372,696.00	5,552,087,608.00	5,964,120,035.00	6,920,886,693.00	6,504,178,387.00		88.28%	86.30%	99.64%	86.87%	6,568,891,066	5,981,129,084
Pelayanan Administrasi Perkantoran	718,538,400.00	1,050,682,947.00	1,316,233,131.00	1,500,816,927.00	1,119,841,167.00	682,807,242.00	1,043,399,915.00	1,314,792,239.00	1,493,801,671.00	1,067,429,259.00	95.03%	99.31%	99.89%	99.53%	95.32%	1,141,222,514	1,120,446,065
Penyediaan Jasa Surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	24,720,000	27,720,000.00	40,050,000.00	57,330,000.00	145,982,500.00	24,000,000	27,000,000.00	39,100,000.00	57,280,000.00	140,932,500.00	97.09%	97.40%	97.63%	99.91%	96.54%	59,160,500	57,662,500
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	16,500,000	20,250,000.00	40,800,000.00	45,300,000.00	53,400,000.00	14,109,792	17,230,289.00	40,578,440.00	39,296,161.00	30,945,580.00	85.51%	85.09%	99.46%	86.75%	57.95%	35,250,000	28,432,052
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)	23,550,000	15,900,000.00	15,900,000.00	14,100,000.00	17,250,000.00	2,580,000	15,899,750.00	15,900,000.00	14,100,000.00	12,455,000.00	10.96%	100.00%	100.00%	100.00%	72.20%	17,340,000	12,186,950
Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan)	31,800,000	39,000,000.00	41,400,000.00	80,730,000.00	78,337,500.00	28,200,000	39,000,000.00	41,400,000.00	80,730,000.00	77,707,500.00	88.68%	100.00%	100.00%	100.00%	99.20%	54,253,500	53,407,500

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
Penyediaan jasa kebersihan kantor		-	-	1,200,000.00	1,200,000.00		-	-	1,200,000.00	1,000,000.00	-	-	-	100.00%	83.33%	480,000	440,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Jasa Tukang)	6,500,000	22,250,000.00	47,000,000.00	36,450,000.00	18,605,000.00	2,860,000	22,250,000.00	47,000,000.00	36,450,000.00	14,800,000.00	44.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79.55%	26,161,000	24,672,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	81,473,200	80,594,300.00	95,123,700.00	86,040,000.00	60,680,000.00	81,473,200	80,594,300.00	95,123,700.00	86,040,000.00	60,680,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80,782,240	80,782,240
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,257,500	61,070,412.00	60,950,000.00	65,600,000.00	48,900,000.00	55,257,500	61,069,000.00	60,950,000.00	65,600,000.00	48,866,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93%	58,355,582	58,348,500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	3,037,500	9,852,500.00	21,797,000.00	20,979,000.00	19,624,000.00	3,037,500	9,852,500.00	21,797,000.00	20,979,000.00	19,624,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	15,058,000	15,058,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	58,375,000	71,925,000.00	22,700,000.00	75,450,000.00	49,200,000.00	56,459,500	71,386,500.00	22,550,000.00	75,240,000.00	48,650,000.00	96.72%	99.25%	99.34%	99.72%	98.88%	55,530,000	54,857,200
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11,600,000	21,000,000.00	30,000,000.00	65,500,000.00	76,600,000.00	10,010,000	18,825,000.00	29,890,000.00	65,500,000.00	65,430,000.00	86.29%	89.64%	99.63%	100.00%	85.42%	40,940,000	37,931,000
Penyediaan makanan dan minuman	34,200,000	66,000,000.00	91,200,000.00	108,000,000.00	40,860,000.00	34,200,000	65,970,000.00	91,200,000.00	108,000,000.00	40,860,000.00	100.00%	99.95%	100.00%	100.00%	100.00%	68,052,000	68,046,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	359,675,200	600,120,735.00	794,312,431.00	795,132,927.00	491,787,167.00	359,669,750	599,412,576.00	794,303,099.00	794,771,510.00	488,468,679.00	100.00%	99.88%	100.00%	99.95%	99.33%	608,205,692	607,325,123
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11,850,000	15,000,000.00	15,000,000.00	49,005,000.00	17,415,000.00	10,950,000	14,910,000.00	15,000,000.00	48,615,000.00	17,010,000.00	92.41%	99.40%	100.00%	99.20%	97.67%	21,654,000	21,297,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	358,030,000.00	194,847,500.00	337,162,000.00	358,356,000.00	317,558,550.00	338,534,550.00	194,639,500.00	312,147,000.00	358,301,000.00	291,105,550.00	94.55%	99.89%	92.58%	99.98%	91.67%	313,190,810	298,945,520

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	5,157,500	-	24,575,000.00	0.00	-	5,157,500	-	24,575,000.00	0.00	-	100.00%	-	100.00%	-	-	5,946,500	5,946,500
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	32,150,000	37,672,500.00	43,740,000.00	91,160,000.00	91,682,500.00	31,592,050	37,642,500.00	43,740,000.00	91,160,000.00	91,082,500.00	98.26%	99.92%	100.00%	100.00%	99.35%	59,281,000	59,043,410
Pengadaan peralatan gedung kantor	60,800,000	19,675,000.00	50,545,000.00	-	-	59,107,500	19,500,000.00	50,105,000.00	-	-	97.22%	99.11%	99.13%	-	-	26,204,000	25,742,500
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	162,500,000	20,000,000.00	83,000,000.00	148,500,000.00	121,500,000.00	153,415,000	20,000,000.00	83,000,000.00	148,445,000.00	99,300,000.00	94.41%	100.00%	100.00%	99.96%	81.73%	107,100,000	100,832,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	102,580,000	117,500,000.00	135,302,000.00	118,696,000.00	104,376,050.00	94,420,000	117,497,000.00	135,302,000.00	118,696,000.00	100,723,050.00	92.05%	100.00%	100.00%	100.00%	96.50%	115,690,810	113,327,610
Peningkatan Disiplin Aparatur	22,575,000.00	15,000,000.00	15,750,000.00	0.00	42,000,000.00	19,238,200.00	12,771,000.00	15,592,500.00	0.00	42,000,000.00	85.22%	85.14%	99.00%	-	100.00%	19,065,000	17,920,340
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12,500,000	-	15,750,000.00	-	21,000,000.00	10,595,200	-	15,592,500.00	-	21,000,000.00	84.76%	-	99.00%	-	100.00%	9,850,000	9,437,540
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	0.00	-	21,000,000.00	-	-	0.00	-	21,000,000.00	-	-	-	-	100.00%	4,200,000	4,200,000
Pengadaan pakaian olahraga	10,075,000	15,000,000.00	-	0.00	-	8,643,000	12,771,000.00	-	0.00	-	85.79%	85.14%	-	-	-	5,015,000	4,282,800
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	158,952,500.00	190,811,000.00	215,679,500.00	334,309,500.00	272,507,800.00	157,452,500.00	190,806,300.00	215,679,500.00	334,309,500.00	272,507,000.00	99.06%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	234,452,060	234,150,960
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	45,075,000	26,325,000.00	42,390,000.00	75,683,000.00	57,683,000.00	45,075,000	26,325,000.00	42,390,000.00	75,683,000.00	57,683,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	49,431,200	49,431,200

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
Penyusunan laporan keuangan semesteran	23,450,000	19,700,000.00	24,747,000.00	37,978,000.00	26,128,800.00	23,450,000	19,700,000.00	24,747,000.00	37,978,000.00	26,128,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	26,400,760	26,400,600
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	32,100,000	38,275,000.00	26,377,500.00	56,065,500.00	19,628,000.00	30,600,000	38,275,000.00	26,377,500.00	56,065,500.00	19,628,000.00	95.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	34,489,200	34,189,200
Penyusunan rencana kerja /RKA/DPA/DPP A satuan kerja perangkat daerah	58,327,500	67,836,000.00	78,240,000.00	100,283,000.00	102,318,000.00	58,327,500	67,831,300.00	78,240,000.00	100,283,000.00	102,318,000.00	100.00%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	81,400,900	81,399,960
Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD	-	38,675,000.00	43,925,000.00	64,300,000.00	66,750,000.00	-	38,675,000.00	43,925,000.00	64,300,000.00	66,750,000.00	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	42,730,000	42,730,000
Pengembangan Data /Informasi	746,432,950.00	875,416,200.00	835,710,200.00	138,793,300.00	287,065,000.00	706,674,250.00	333,671,800.00	300,106,968.00	138,718,077.00	246,854,532.00	94.67%	38.12%	35.91%	99.95%	85.99%	576,683,530	345,205,125
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	29,767,750	33,275,000.00	40,975,000.00	-	-	21,994,750	33,275,000.00	40,239,000.00	-	-	73.89%	100.00%	98.20%	-	-	20,803,550	19,101,750
Penyusunan profil daerah	63,569,000	50,120,000.00	-	-	-	55,851,100	50,088,500.00	-	-	-	87.86%	99.94%	-	-	-	22,737,800	21,187,920
Operasional Website/Up dating data dan informasi	-	56,504,000.00	42,810,000.00	-	-	-	54,374,000.00	42,810,000.00	-	-	-	96.23%	100.00%	-	-	19,862,800	19,436,800
Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)	64,453,200	68,322,200.00	75,860,000.00	102,253,300.00	45,815,000.00	44,186,200	68,322,200.00	75,860,000.00	102,178,077.00	44,315,000.00	68.56%	100.00%	100.00%	99.93%	96.73%	71,340,740	66,972,295
Pelayanan pendataan ijin	50,000,000	59,552,000.00	73,148,000.00	36,540,000.00	-	49,925,000	59,397,000.00	73,108,000.00	36,540,000.00	-	99.85%	99.74%	99.95%	100.00%	-	43,848,000	43,794,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
penelitian																	
Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	69,000,00 0.00	68,200,00 0.00	-	-	-	68,215,10 0.00	68,089,96 8.00	-	-	-	98.86%	99.84%	-	-	27,440,000	27,261,014
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima		-	-	-	241,250,0 00.00		-	-	-	202,539 ,532.00	-	-	-	-	83.95%	48,250,000	40,507,906
Penyusunan peta wilayah	538,643,000	538,643,0 00.00	534,717,2 00.00			534,717,2 00					99.27%					322,400,640	106,943,44 0
Kerjasama Pembangunan	378,570,000. 00	272,552,7 00.00	421,010,5 09.00	602,650,0 00.00	726,076,5 00.00	335,427,8 00.00	258,243,6 00.00	414,810,5 09.00	602,060 ,240.00	234,617 ,607.00	88.60%	94.75%	98.53%	99.90%	32.31%	480,171,942	369,031,95 1
Koordinasi program P2KP dan PNPB	99,327,000	26,391,00 0.00	115,850,0 00.00	-	-	77,201,00 0	25,916,00 0.00	112,750,0 00.00	-	-	77.72%	98.20%	97.32%	-	-	48,313,600	43,173,400
Koordinasi review rencana program dan investasi jangka menengah bidang cipta karya	47,150,000	46,840,00 0.00	51,865,00 0.00	-	154,500,0 00.00	43,150,00 0	45,390,00 0.00	51,865,00 0.00	-	62,100, 000.00	91.52%	96.90%	100.00%	-	40.19%	60,071,000	40,501,000
Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bima	132,753,000	106,005,0 00.00	115,850,0 00.00	207,335,0 00.00	116,076,5 00.00	122,378,8 00	106,005,0 00.00	112,750,0 00.00	207,278 ,273.00	101,996 ,500.00	92.19%	100.00%	97.32%	99.97%	87.87%	135,603,900	130,081,71 5
Koordinasi program NUSP – phase 2	99,340,000	93,316,70 0.00	137,445,5 09.00	97,665,00 0.00	455,500,0 00.00	92,698,00 0	80,932,60 0.00	137,445,5 09.00	97,387, 973.00	70,521, 107.00	93.31%	86.73%	100.00%	99.72%	15.48%	176,653,442	95,797,038
Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah	-	-	-	297,650,0 00.00	-	-	-	-	297,393 ,994.00		-	-	-	99.91%	-	59,530,000	59,478,799
Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	368,254,200. 00	404,521,0 00.00	802,903,7 72.00	589,800,0 00.00	334,015,0 00.00	331,848,2 00.00	297,066,1 00.00	430,780,9 72.00	586,233 ,495.00	171,448 ,028.00	90.11%	73.44%	53.65%	99.40%	51.33%	499,898,794	363,475,35 9

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan	-	71,450,00 0.00	353,914,8 86.00	-	-	-	71,450,00 0.00	215,390,4 86.00	-	-	-	100.00%	60.86%	-	-	85,072,977	57,368,097
Koordinasi dan advokasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)	168,654,200	147,106,0 00.00	224,180,0 00.00	88,000,00 0.00	39,400,00 0.00	142,924,2 00	144,142,0 00.00	85,985,00 0.00	88,000, 000.00	33,850, 000.00	84.74%	97.99%	38.36%	100.00%	85.91%	133,468,040	98,980,240
Percepatan Implementasi PERDA tentang Bangunan Gedung	-	-	50,000,00 0.00	-	-	-	-	49,670,60 0.00	-	-	-	-	99.34%	-	-	10,000,000	9,934,120
Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	98,600,000	-	79,734,88 6.00	345,800,0 00.00	22,355,00 0.00	93,850,00 0	-	79,734,88 6.00	343,778 ,623.00	22,110, 000.00	95.18%	-	100.00%	99.42%	98.90%	109,297,977	107,894,70 2
Fasilitasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	-	84,965,00 0.00	-	-	-	-	81,474,10 0.00	-	-	-	-	95.89%	-	-	-	16,993,000	16,294,820
Penyusunan KLHS RPJMD	-	-	-	156,000,0 00.00	-	-	-	-	154,454 ,872.00	-	-	-	-	99.01%	-	31,200,000	30,890,974
Penyusunan Master Plan Drainase	-	-	-	-	155,000,0 00.00	-	-	-	-	56,700, 000.00	-	-	-	-	36.58%	31,000,000	11,340,000
Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	117,260,0 00.00	-	-	-	-	58,788, 028.00	-	-	-	-	50.13%	23,452,000	11,757,606
b Penyusunan rencana induk pengembangan pelayanan persampahan	-	10100000 0	95,074,00 0.00	-	-	95,074,00 0	-	-	-	-	94.13%	-	-	-	-	59,414,800	19,014,800

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	0		75,285,00 0.00		0	0		75,035,00 0.00		0	-	-	99.67%	-	-	15,057,000	15,007,000
Seminar Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam	-	-	75,285,00 0.00	-	-	-	-	75,035,00 0.00	-	-	-	-	99.67%	-	-	15,057,000	15,007,000
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Perencanaan Pembangunan Daerah	1,424,011,89 0	1,561,147, 605	1,556,482, 341	1,971,618, 573	2,133,058, 744	1,375,742, 790	1,521,381, 161	1,553,061, 614	1,967,9 41,409	2,058,7 37,718	96.61%	97.45%	99.78%	99.81%	96.52%	1,729,263,83 1	1,695,372, 938
Penyusunan rancangan RPJMD	-	-	-	-	132,525,0 00.00	-	-	-	-	131,131 ,200.00	-	-	-	-	98.95%	26,505,000	26,226,240
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	-	-	-	-	106,000,0 00.00	-	-	-	-	93,075, 000.00	-	-	-	-	87.81%	21,200,000	18,615,000
Penetapan RPJMD	-	-	-	-	271,264,5 00.00	-	-	-	-	261,346 ,900.00	-	-	-	-	96.34%	54,252,900	52,269,380
Penyusunan rancangan RKP	62,873,990	104,671,2 40.00	124,450,0 00.00	181,586,8 68.00	120,878,0 00.00	56,448,99 0	104,671,2 40.00	124,450,0 00.00	181,586 ,868.00	112,078 ,000.00	89.78%	100.00%	100.00%	100.00%	92.72%	118,892,020	115,847,020
Penyelenggaraan musrenbang RKP	213,276,500	229,432,2 65.00	304,799,0 00.00	464,269,7 05.00	415,044,2 31.00	212,226,3 00	229,432,2 65.00	304,625,5 24.00	464,269 ,705.00	412,504 ,231.00	99.51%	100.00%	99.94%	100.00%	99.39%	325,364,340	324,611,605
Penetapan RKP	52,130,500	98,875,50 00.00	97,310,00 00.00	161,453,5 00.00	163,953,0 00.00	44,805,50 0	98,875,50 00.00	97,310,00 00.00	161,453 ,500.00	163,953 ,000.00	85.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	114,744,500	113,279,500
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	91,162,100	128,742,1 00.00	136,835,0 00.00	210,668,0 00.00	331,830,0 00.00	91,162,10 0	128,742,1 00.00	136,835,0 00.00	210,668 ,000.00	331,325 ,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.85%	179,847,440	179,746,440

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	127,503,000	151,227,000.00	158,079,591.00	154,446,000.00	317,000,000.00	115,665,000	145,288,280.00	157,168,591.00	153,741,336.00	312,162,342.00	90.72%	96.07%	99.42%	99.54%	98.47%	181,651,118	176,805,110
Perencanaan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan (DBH cukai tembakau)	75,008,000	196,750,000.00	193,630,500.00	200,000,000.00	140,000,000.00	71,354,100	185,668,100.00	191,846,500.00	197,946,769.00	112,598,032.00	95.13%	94.37%	99.08%	98.97%	80.43%	161,077,700	151,882,700
Koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan tugas pembantuan daerah	80,076,000	91,214,000.00	90,100,000.00	29,564,500.00	-	67,523,000	89,642,154.00	90,005,460.00	29,564,500.00	-	84.32%	98.28%	99.90%	100.00%	-	58,190,900	55,347,023
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan litbang	104,721,800	119,056,000.00	125,101,000.00	122,025,000.00	-	102,027,800	118,010,922.00	124,828,900.00	121,673,325.00	-	97.43%	99.12%	99.78%	99.71%	-	94,180,760	93,308,189
Review RPJMD	-	53,899,500.00	-	-	-	-	53,859,500.00	-	-	-	-	99.93%	-	-	-	10,779,900	10,771,900
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	-	78,635,000.00	99,292,250.00	-	-	-	78,635,000.00	99,292,250.00	-	-	-	100.00%	100.00%	-	-	35,585,450	35,585,450
Review Raperda RPJMD	-	167,093,000.00	-	250,000,000.00	-	-	161,051,100.00	-	249,744,635.00	-	-	96.38%	-	99.90%	-	83,418,600	82,159,147
Updating / Pembaruan Data Capaian Kinerja RPJMD	-	-	63,775,000.00	-	-	-	-	63,633,400.00	-	-	-	-	99.78%	-	-	12,755,000	12,726,680
Pengelolaan Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	104,035,000.00	-	-	-	-	104,035,000.00	-	-	-	-	100.00%	-	-	20,807,000	20,807,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	-	59,075,00 0.00	-	-	-	-	59,030,98 9.00	-	-	-	-	99.93%	-	-	11,815,000	11,806,198
E- Musrenbang	-	106,177,0 00.00	-	-	-	-	92,250,00 0.00	-	-	-	-	86.88%	-	-	-	21,235,400	18,450,000
Koordinasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	35,375,00 0.00	-	50,000,00 0.00	-	-	35,255,00 0.00	-	49,921, 303.00	-	-	99.66%	-	99.84%	-	17,075,000	17,035,261
Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	-	-	-	33,975,00 0.00	-	-	-	-	33,829, 000.00	-	-	-	-	99.57%	-	6,795,000	6,765,800
E - Planning	-	-	-	113,630,0 00.00	109,519,0 13.00	-	-	-	113,542 ,468.00	103,519 ,013.00	-	-	-	99.92%	94.52%	44,629,803	43,412,296
Koordinasi Pelaksanaan Anugerah Pangripta Nusantara	-	-	-	-	25,045,00 0.00	-	-	-	-	25,045, 000.00	-	-	-	-	100.00%	5,009,000	5,009,000
Penyelenggaraan kerjasama perencanaan pembangunan daerah	617,260,000	-	-	-	-	614,530,0 00	-	-	-	-	99.56%	-	-	-	-	123,452,000	122,906,00 0
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	354,565,000	432,918,0 00	347,225,0 00	245,950,0 00	60,485,00 0	344,984,8 00	425,353,9 53	346,600,2 00	244,770 ,000	57,185, 000		98.25%	99.82%	99.52%	94.54%	288,228,600	283,778,79 1
Penyusunan profil UKM dan koperasi	70,000,000	-	-	-	-	69,825,00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	13,965,000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	225,314,000	312,828,0 00.00	145,750,0 00.00	-	-	216,973,8 00	307,431,6 53.00	145,400,2 00.00	-	-	-	98.27%	99.76%	-	-	136,778,400	133,961,13 1

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
Pengembangan ekonomi lokal	59,251,000	120,090,000.00	117,475,000.00	86,650,000.00	60,485,000.00	58,186,000	117,922,300.00	117,200,000.00	86,510,000.00	57,185,000.00		98.19%	99.77%	99.84%	94.54%	88,790,200	87,400,660
Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	84,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	84,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	100.00%	100.00%	-	36,800,000	36,800,000
Road Map Pengendalian Inflasi Daerah		-	-	59,300,000.00	-		-	-	58,260,000.00	-		-	-	98.25%	-	11,860,000	11,652,000
Perencanaan Sosial Budaya	383,324,100	601,473,000	655,881,920	754,938,500	956,312,989	380,706,300	593,429,400	654,932,220	749,812,797	895,074,583	99.32%	98.66%	99.86%	99.32%	93.60%	670,386,102	654,791,060
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	-	411,290,000.00	319,606,920.00	362,236,205.00	472,527,003.00		403,654,400.00	319,027,220.00	357,127,700.00	416,298,597.00	-	98.14%	99.82%	98.59%	88.10%	313,132,026	299,221,583
Koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pendidikan	282,118,600	-	-	-	-	280,750,800	-	-	-	-	99.52%	-	-	-	-	56,423,720	56,150,160
Penyusunan Profil Pendidikan	101,205,500	67,183,000.00	-	-	-	99,955,500	67,183,000.00	-	-	-	98.76%	100.00%	-	-	-	33,677,700	33,427,700
Penyusunan Profil Kesehatan	-	67,358,500.00	-	-	72,100,000.00	-	67,070,500.00	-	-	70,350,000.00	-	99.57%	-	-	97.57%	27,891,700	27,484,100
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	-	-	107,230,000.00	77,779,271.00	-	-	-	106,990,000.00	77,769,271.00	-	-	-	99.78%	99.99%	-	37,001,854	36,951,854
Pengendalian dan Advokasi Kota Sehat	-	-	145,045,000.00	-	60,555,311.00	-	-	144,915,000.00	-	60,455,311.00	-	-	99.91%	-	99.83%	41,120,062	41,074,062

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	-	84,000,00 0.00	130,707,1 98.00	-	-	-	84,000,00 0.00	130,700 ,000.00	-	-	-	100.00%	99.99%	-	42,941,440	42,940,000
Koordinasi Program Keluarga Harapan	-	55,641,50 0.00	-	-	-	-	55,521,50 0.00	-	-	-	-	99.78%	-	-	-	11,128,300	11,104,300
Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak	-	-	-	-	96,266,35 5.00	-	-	-	-	96,106, 355.00	-	-	-	-	99.83%	19,253,271	19,221,271
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	-	-	-	-	91,781,22 0.00	-	-	-	-	89,031, 220.00	-	-	-	-	97.00%	18,356,244	17,806,244
Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	-	-	-	87,352,82 6.00	58,100,00 0.00	-	-	-	87,352, 826.00	58,100, 000.00	-	-	-	100.00%	100.00%	29,090,565	29,090,565
Penyusunan Profil Kelurahan	-	-	-	96,863,00 0.00	63,200,00 0.00	-	-	-	96,863, 000.00	63,200, 000.00	-	-	-	100.00%	100.00%	32,012,600	32,012,600
Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi	-	-	-	-	41,783,10 0.00	-	-	-	-	41,533, 100.00	-	-	-	-	99.40%	8,356,620	8,306,620
Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	142,700,000	183,184,0 00	331,700,5 13	448,985,0 00	1,238,680, 000	139,048,6 64	178,664,3 79	330,581,3 13	444,938 ,504	782,214 ,635	97.44%	97.53%	99.66%	99.10%	63.15%	469,049,903	375,089,49 9
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan SDA	-	183,184,0 00.00	247,700,5 13.00	351,150,0 00.00	1,001,165, 000.00	-	178,664,3 79.00	246,581,3 13.00	347,113 ,504.00	550,230 ,245.00	-	97.53%	99.55%	98.85%	54.96%	356,639,903	264,517,88 8
Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana	142,700,000	-	84,000,00 0.00	-	237,515,0 00.00	139,048,6 64	-	84,000,00 0.00	-	231,984 ,390.00	97.44%	-	100.00%	-	97.67%	92,843,000	91,006,611

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
Wilayah dan Sumber Daya Alam																	
Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	-	-	-	49,985,00 0.00	-		-	-	49,975, 000.00	-	-	-	-	99.98%	-	9,997,000	9,995,000
Pemetaan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	47,850,00 0.00	-		-	-	47,850, 000.00	-	-	-	-	100.00%	-	9,570,000	9,570,000
Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana daerah	154,582,400	506,522,5 00	0	0	141,290,0 00	151,907,4 00	502,660,5 00	0	0	136,092 ,650	98.27%	99.24%	-	-	96.32%	160,478,980	158,132,11 0
Penelitian air tanah	120,439,500	-	-	-	-	120,289,5 00	-	-	-	-	99.88%	-	-	-	-	24,087,900	24,057,900
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	34,142,900	400,000,0 00.00	-	-	-	31,617,90 0	396,413,0 00.00	-	-	-	92.60%	99.10%	-	-	-	86,828,580	85,606,180
Survey DAS Kota Bima dalam Pengembangan PLTMH	-	106,522,5 00.00	-	-	-	-	106,247,5 00.00	-	-	-	-	99.74%	-	-	-	21,304,500	21,249,500
Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	-	-	-	-	141,290,0 00.00	-	-	-	-	136,092 ,650.00	-	-	-	-	96.32%	28,258,000	27,218,530
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					264,476,2 50.00					248,911 ,825.00	-	-	-	-	94.12%	52,895,250	49,782,365
Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	119,699,7 80.00	-	-	-	-	107,501 ,825.00					89.81%	23,939,956	21,500,365

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21
Pelayanan Izin Penelitian	-	-	-	-	62,830,00 0.00	-	-	-	-	61,480, 000.00		-	-	-	97.85%	12,566,000	12,296,000
Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan	-	-	-	-	81,946,47 0.00	-	-	-	-	79,930, 000.00		-	-	-	97.54%	16,389,294	15,986,000

Sumber: Hasil Analisa

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan dan pencapaian target kinerja serta realisasi anggaran Bappeda Litbang Kota Bima selama periode 2014-2018 antara lain adalah kesesuaian antara program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Litbang Kota Bima dengan program prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima. Disamping itu juga, ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang meskipun secara kuantitas masih sangat kurang namun memiliki semangat kerja dan motivasi kerja yang cukup baik sehingga mampu mendorong akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu terbangunnya koordinasi, kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan perangkat daerah maupun stakeholders lainnya sehingga indikator kinerja dapat direalisasikan dengan mencapai target maupun belum mencapai target.

Selain beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan diatas, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan, yakni ketersediaan data dan informasi yang akurat dan *up to date*, ketersediaan sumber daya aparatur sipil yang terbatas dari segi kuantitas juga tidak didukung dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi bidang perencanaan pembangunan. Kemudian faktor yang terakhir adalah siklus perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu. Apabila dilihat dari segi rasio antara realisasi dan anggaran, rasio dapat dikatakan baik dan efektif meskipun belum menunjukkan *trend* yang meningkat setiap tahunnya. Permasalahan anggaran ini juga terkait dengan belum dimilikinya Analisa Standar Biaya (ASB) untuk program/kegiatan yang dilaksanakan yang menyebabkan tidak adanya standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu system, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritas perencanaan dan penganggaran belum terbangun mekanisme yang memungkinkan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran secara sistematis berjalan

dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan oleh banyaknya kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKPD pada akhirnya harus tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga masih ada kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bappeda Litbang Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kinerja pelayanan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tantangan didefinisikan sebagai hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya). Dari definisi tersebut dapat dijabarkan bahwa tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bappeda Litbang Kota Bima. Peluang didefinisikan dalam KBBI sebagai ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Definisi ini dapat diartikan bahwa peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Bappeda Litbang Kota Bima dalam 5 (lima) tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Bappeda Litbang Kota Bima dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

II.3.1. Tantangan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan yang masih dan akan dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Litbang maupun kontribusinya dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD yaitu:

1. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan;
2. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan);
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah lintas sektor maupun lintas wilayah sehingga evaluasi capaian kinerja yang tidak didukung oleh metadata yang komprehensif dan memadai
4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain;
5. Sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan yang perlu ditingkatkan;
6. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.
7. Perangkat Daerah belum optimal untuk memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan pembangunan di masa mendatang.

II.3.2. Peluang

Adapun peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bappeda Litbang Kota Bima dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan, penganggaran dan monitoring maupun evaluasi.
2. Kewenangan dan peran Bappeda Litbang Kota sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah menjadikan struktur organisasi Bappeda dapat berkembang menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda Litbang Kota Bima dalam pengembangan metode dan instrument perencanaan pembangunan maupun pengembangan dan penelitian.

4. Tuntutan *stakeholder* terhadap ketersediaan data dan informasi pembangunan maupun produk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.
5. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
6. Makin meningkatnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
7. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima
8. Adanya kemungkinan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kota Bima periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan pembangunan. Permasalahan ini menjadi salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Bappeda Litbang Kota Bima 5 (lima) tahun mendatang.

Selain itu perumusan isu-isu strategis Bappeda Litbang Kota Bima periode 2018-2023 juga berdasarkan pada telaahan visi, misi, dan program Walikota terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementrian/Lembaga, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), telaah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG's) serta Standar Pelayanan Minimum.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan gambaran tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda Litbang Kota Bima sebagaimana yang diuraikan pada Bab 2, beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, diantaranya:

- a. Keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan yang belum optimal
- b. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
- c. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan uptodate belum maksimal
- d. Ketersediaan sumber daya manusia khususnya fungsional perencana yang masih sangat minim
- e. Penelitian dan inovasi belum optimal

- f. Penyesuaian nomenklatur akibat perubahan struktur organisasi belum dilakukan secara optimal

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018-2023 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan kebijakan dan Prioritas Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2013-2018

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keselarasan dan kualitas dokumen perencanaan	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dan penganggaran	Perencanaan pembangunan yang belum berbasis aplikasi e-planning maupun simda perencanaan Belum terpadunya koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam Perencanaan maupun antara perencanaan dengan penganggaran.
2	Sistem Data dan pengelolaan informasi pembangunan belum terbangun dengan baik	Kewenangan pengembangan data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan dialihkan ke Perangkat Daerah	Belum optimalnya penerapan SIPD dalam pengisian elemen data dan informasi pembangunan yang penting bagi perencanaan dan monev
3	Pengendalian Perencanaan Pembangunan belum komprehensif	Masih focus hanya pada monev triwulan capaian	Belum optimalnya Penerapan aplikasi SIMONE sebagai instrument

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kinerja Renja	evaluasi dan pengukuran kinerja perencanaan pembangunan
4	Penelitian dan Pengembangan belum optimal	Rendahnya minat pada bidang penelitian dan pengembangan	Belum ada tenaga fungsional peneliti Pojka penelitian belum terbentuk
5	Ketersediaan Sumber daya aparatur	Fasilitator perencanaan yang handal masih minim	Belum ada tenaga fungsional perencana Belum ada ASN yang diikutkan dalam Diklat teknis dan kompetensi bidang perencanaan

Sumber: Hasil Analisa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023, maka Visi Kota Bima untuk periode tahun 2018-2023 adalah: *Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri*. Visi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Bagian Pertama: Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara

- a. Kota Bima yang Berkualitas adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.

Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.

b. Setara adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah, dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Masyarakat Sejahtera adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;
- Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
- Akuntabilitas adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
- Lingkungan Perkotaan yang Ramah adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat Agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua: *Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri*

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas.Oleh karenanya pengertian

kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Adapun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Masyarakat yang Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.
- b. Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

Dalam rangka upaya perwujudan visi pembangunan Kota Bima tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Daerah, maka Bappeda Litbang memiliki rasa tanggung jawab dalam mewujudkan kelima misi pembangunan tersebut. Bersamaan dengan itu pula, Bappeda Litbang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian misi pembangunan nomor 3 yaitu Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan tolok ukur indeks reformasi birokrasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan nilai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran ini adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui internalisasi delapan agenda reformasi birokrasi. Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai oleh kontribusi PAD terhadap pendapatan. Strategi yang dilaksanakan untuk sasaran ini adalah meningkatkan tata kelola pendapatan daerah. Sedangkan sasaran ketiga dari misi ketiga ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan tolok ukur skor indeks kepuasan masyarakat dengan strategi pelaksanaan yang di tempuh adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sektor, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan salah satu faktor kunci tercapainya misi tersebut. Disamping misi ketiga tersebut, Bappeda Litbang berperan untuk pencapaian setiap misi pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Misi pertama, yaitu Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia yang dijabarkan kedalam tiga sasaran yaitu: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatnya daya beli masyarakat dan meningkatnya ketahanan pangan. Indikator pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. Beberapa strategi yang akan diterapkan dalam rangka mencapai target indikator sasaran ini adalah Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima baik dalam preventif maupun kuratif. Strategi ini akan meliputi upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan upaya pelayanan kesehatan, regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga. Sedangkan indikator pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan diukur dengan Angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar dan persentase peningkatan mutu pendidikan. Strategi yang diterapkan untuk mencapainya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan PAUD dan Pendidikan dasar yang berkualitas, maupun non-formal serta informal. Peningkatan pengembangan pendidikan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta optimalisasi pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan. Sedangkan sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan tolak ukur pengeluaran perkapita. Untuk mencapai hal tersebut maka secara garis besar strategi pencapaiannya adalah stabilisasi perekonomian, pembangunan kawasan dan penguatan sector strategis. Disamping itu, potensi-potensi kelembagaan ekonomi mikro-kecil dan koperasi untuk diberdayakan dan dioptimalisasi produktivitasnya. Sasaran terakhir atau keempat dari misi 1 adalah meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator indeks ketahanan pangan akan ditempuh melalui strategi Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan, peningkatan pembinaan budidaya dan produk kehewanian dan perikanan, serta peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil pertanian. Peran Bappeda Litbang dalam hal ini adalah mengkoordinasikan

perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan perekonomian.

Misi kedua Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan indikator indeks gini dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan indikator angka kemiskinan. Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah yang pertama adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan PDRB. Sasaran ini dimaknai dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan per kapita. Naiknya PDRB, dengan dibarengi turunnya tingkat ketimpangan, merupakan indikator menguatnya ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatnya daya saing kota Bima. Oleh karena itu strategi pencapaiannya adalah Mengembangkan sector pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus didukung pengembangannya dengan berbagai pengelolaan, promosi dan pembinaan. Disamping itu, simpul-simpul bisnis seperti industri dan perdagangan termasuk didalamnya adalah pasar, sangat penting untuk dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Sektor pertanian dan perikanan juga tetap dipertahankan produktifitasnya yang mengarah pada pengembangan bibit unggul dan pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah. Aspek yang tidak kalah penting dalam pengembangan ekonomi adalah membangun iklim investasi yang kondusif dan kemudahan pelayanan perijinan. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan pelayanan dan regulasi terkait perijinan usaha dan penanaman modal menjadi satu strategi penting yang akan dikelola dalam lima tahun kedepan. Peran Bappeda Litbang dalam ikut mewujudkan sasaran pertama dari misi kedua tersebut adalah fungsi koordinatifnya sebagai instansi perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, ekonomi kerakyatan atau usaha mikro-kecil, koperasi, pariwisata, ekonomi kreatif, pasar dan investasi adalah ragam isu yang ditangani di bawah koordinasi bidang ekonomi. Dengan demikian, amanah yang diembanya adalah untuk memastikan bahwa misi penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing kota tercapai melalui

koordinasi-koordinasi dengan OPD yang bertanggung-jawab dalam berbagai aspek ekonomi, serta berbagai pemangku kepentingan lain yang terkait.

Sedangkan sasaran kedua dari misi kedua adalah menurunnya angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan, ditempuh dengan strategi meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS. peningkatan akses ini akan mencakup perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan advokasi dan rehabilitasi sosial, dan peningkatan data, informasi dan pemberdayaan social, peningkatan pemberdayaan masyarakat secara umum, peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, peningkatan perlindungan anak, serta peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan pada 5 kecamatan. Karena persoalan kemiskinan memiliki sifat lintas sektor yang akan sukar penyelesaiannya jika hanya melibatkan satu atau dua OPD untuk mengintervensinya. Oleh karenanya, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas sektor memiliki sekretariat di Bappeda Litbang sebagai pusat koordinasi. Dalam hal ini, tentu saja Bappeda Litbang diharapkan untuk secara pro-aktif melibatkan dan mendorong peran serta berbagai pemangku sector dan pemangku kepentingan untuk ikut bersama-sama menurunkan angka kemiskinan di Kota Bima, sesuai dengan tugas dan kompetensi masing-masing.

Sedangkan sasaran ketiga dari misi kedua adalah meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka yang dilaksanakan melalui strategi meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai wadah penyediaan tenaga kerja trampil serta peningkatan akses permodalan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), perluasan jaringan pemasaran ketenagakerjaan dan membangun hubungan industrial ketenagakerjaan. Disamping itu juga keselamatan dan perlindungan tenaga kerja menjadi aspek yang penting dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Misi Ketiga adalah Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dibagian awal sudah diuraikan terkait tujuan dan sasaran dari Misi ketiga ini. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, misi ini berkaitan erat dengan banyak OPD dalam pelaksanaannya, oleh karena itu beberapa hal yang berkaitan dengan area reformasi birokrasi yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan

penyelenggaraan tata pemerintahan, penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan pengadaan barang/ jasa, peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketata-laksanaan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan secretariat daerah, peningkatan pelayanan kedinasaan pucuk pimpinan daerah, peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan di berbagai bidang, peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah, peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran, pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer, peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan, peningkatan perencanaan, pemanfaatan, dan inventarisasi asset, peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah, pengoptimalan pembukuan dan penagihan pajak daerah, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintah dan aparatur, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan di berbagai bidang, peningkatan dan evaluasi pengawasan, peningkatan pengembangan karir aparatur sipil Negara, peningkatan kompetensi aparatur sipil Negara, peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, peningkatan pengelolaan pengembangan kearsipan, penyelamatan data dan informasi arsip, pengoptimalan penyusunan fasilitasi penyusunan perundang-undangan, peningkatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, peningkatan pengelolaan informasi dan statistic, peningkatan komunikasi public, pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, dan peningkatan pelayanan persandian. Tugas Bappeda Litbang , selain secara langsung ikut berkontribusi dalam meningkatkan tata Kelola pemerintah dalam bidang perencanaan, adalah dengan turut mengkoordinasikan OPD terkait yang ikut berperan dalam mewujudkan misi untuk memastikan tercapainya misi tersebut.

Misi keempat, Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana; dicapai dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dengan indkator Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup. Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana dengan indikator persentase luas kawasan permukiman layak. Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang dengan indikator persentase kesesuaian tata ruang, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator persentase kawasan kumuh, meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dengan indikator persentase infrastruktur dalam kondisi baik dan meningkatnya ketahanan terhadap bencana dengan indikator indeks ketahanan daerah. Sasaran pertama dapat dicapai dengan beberapa strategi meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Bima. Ini dimaksudkan untuk peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang, peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang, dan optimalisasi pengelolaan pertanahan. Sementara itu, keberhasilan untuk sasaran kedua dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dilaksanakan dengan strategi membangun system pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat secara terpadu, peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup, optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik. Selanjutnya strategi yang ditempuh dalam upaya mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman adalah peningkatan ketersediaan PSU dan pembangunan rumah layak huni. Adapun strategi dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung produktifitas sector unggulan daerah dan investasi yang meliputi jalan, jembatan, PJU, pengairan, drainase, sarana pengolahan limbah, sarana dan prasarana air bersih dan bangunan sesuai standar, lalu lintas dan parkir, peningkatan angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas. Sasaran kelima dari misi ke empat RPJMD Kota Bima adalah meningkatnya ketahanan terhadap bencana yang akan ditempuh dengan strategi meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Bappeda, terutama dibawah koordinasi bidang Ekonomi dan Infrastruktur memiliki peran untuk

memastikan bahwa misi ini tertuang dan dilaksanakan dalam program/kegiatan dari OPD yang terkait.

Misi kelima Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais. Tujuan misi ini adalah meningkatkan masyarakat yang tenteram, bermoral dan agamais dengan indikator indeks ketentraman dengan didukung oleh tiga sasaran strategis. Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dengan indikator angka kriminalitas dan angka konflik sosial. Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal dengan indikator presentase nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina. Sedangkan sasaran strategis yang ketiga adalah meningkatnya pengamalan ajaran agama dengan indikator indeks kerukunan umat beragama. Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran pertama adalah meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta konflik social guna mewujudkan stabilitas daerah. Kemudian strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah dengan memperluas cakupan perlindungan dan pengembangan budaya daerah. Sedangkan strategi untuk mencapai sasaran ketiga adalah dengan meningkatkan kerukunan umat beragama dan mendorong syiar keagamaan di kalangan masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

No	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi:3 Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang	Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Adanya pemahaman yang berbeda terkait penerapan permendagri 86 tahun 2017 dengan PermenPan RB nomor 12 tahun 2015	Adanya komitmen Walikota untuk menerbitkan pedoman perencanaan pembangunan daerah yang

No	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Baik</p> <p>Tujuan Misi 3: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>Sasaran: Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>			mengintegrasikan dua peraturan tersebut
		Koordinasi, sinkronisasi dan keselarasan dokumen perencanaan belum optimal	Belum terpadunya koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam Perencanaan	Adanya komitmen sekretaris daerah beserta seluruh pimpinan OPD untuk membangun peta proses bisnis organisasi untuk keterpaduan koordinasi perencanaan
		Data dan pengelolaan informasi pembangunan belum terbangun dengan baik	Pengumpulan dan penyajian data kinerja belum melekat pada setiap pegawai	Adanya komitmen untuk menyusun data kebutuhan perencanaan pembangunan
		Pengendalian Perencanaan Pembangunan belum komprehensif	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi evaluasi kinerja e-monev	Diterapkannya aplikasi SIPD dan aplikasi e-sakip
		Penelitian dan Pengembangan belum optimal	Rendahnya minat pada bidang penelitian dan pengembangan	Adanya komitmen untuk membentuk pokja kelitbang daerah

Sumber: RPJMD Kota Bima 2018-2023, data diolah

3.3. Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas

Dalam merumuskan Renstra, Bappeda Litbang Kota Bima perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Bappeda Litbang Kota Bima mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024. Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian

PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah: **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas bermakna bahwa 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; 2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antar daerah; dan 3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Kredibel bermakna bahwa perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan melalui 2 (dua) misi

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, Bappeda Litbang Kota Bima dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan mempedomani Renstra Kementerian PPN/Bappenas terutama dalam hal mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, selaras dan konsisten secara substantif antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas juga dimaknai sebagai perumusan program pembangunan harus benar-benar terukur dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian visi misi daerah maupun tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah.

Visi Indonesia	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Visi Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Misi Bappenas	Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa				Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.			
Tujuan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.		Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan		Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.			
Sasaran	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		
Indikator Sasaran	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang Dijalankan Oleh K/L	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L	Indeks RB	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Bima
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi:1 Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa</p> <p>Tujuan 1 Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia</p> <p>Sasaran 1 tujuan 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional</p> <p>Sasaran 2 tujuan 1: Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional</p>	Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Adanya pemahaman yang berbeda terkait penerapan permendagri 86 tahun 2017 dengan PermenPan RB nomor 12 tahun 2015	Adanya komitmen Walikota untuk menerbitkan pedoman perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan dua peraturan tersebut
		Koordinasi, sinkronisasi dan keselarasan dokumen perencanaan belum optimal	Belum terpadunya koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam Perencanaan	Adanya komitmen sekretaris daerah beserta seluruh pimpinan OPD untuk membangun peta proses bisnis organisasi untuk keterpaduan koordinasi perencanaan
		Data dan pengelolaan informasi pembangunan belum terbangun dengan baik	Pengumpulan dan penyajian data kinerja belum melekat pada setiap pegawai	Adanya komitmen untuk menyusun data kebutuhan perencanaan pembangunan
		Pengendalian Perencanaan Pembangunan belum komprehensif	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi evaluasi kinerja e-monev	Diterapkannya aplikasi SIPD dan aplikasi e-sakip

Sumber: Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas 2020-2024, data diolah

3.4. Telaahan terhadap Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga yang mengkoordinir perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkewajiban untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan berorientasi pada pencapaian visi pembangunan Nusa Tenggara Barat. Adapun visi pembangunan Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023 adalah “**Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang**”. Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna:

1. Suatu kondisi masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
2. Suatu kondisi masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya dibidang sosial, budaya dan ekonomi, yang dipenuhi dari hasil kreativitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintah yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *baldatun toyyibatunwarobbun ghofur*.

Upaya pencapaian visi tersebut akan dilakukan melalui beberapa misi sebagai berikut:

1. NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan Infrastruktur serta konektivitas wilayah.
2. NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. NTB Sehat dan Cerdas melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. NTB Asri dan Lestari melalui pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

6. NTB Aman dan Berkah melalui perwujudan masyarakat yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Berkaitan dengan pelaksanaan misi tersebut, Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB telah menetapkan tujuan Bappeda yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dengan sasaran strategis Meningkatnya dokumen perencanaan yng berkualitas. Tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi NTB ini akan menjadi salah satu panduan yang mengarahkan pelayanan perencanaan pembangunan pada Bappeda Kota Bima.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Bima
berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi NTB beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas Sasaran: Meningkatnya dokumen perencanaan yng berkualitas	Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Adanya pemahaman yang berbeda terkait penerapan permendagri 86 tahun 2017 dengan PermenPan RB nomor 12 tahun 2015	Adanya komitmen Walikota untuk menerbitkan pedoman perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan dua peraturan tersebut
		Koordinasi, sinkronisasi dan keselarasan dokumen perencanaan belum optimal	Belum terpadunya koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam Perencanaan	Adanya komitmen sekretaris daerah beserta seluruh pimpinan OPD untuk membangun peta proses bisnis organisasi untuk keterpaduan koordinasi perencanaan
		Pengendalian Perencanaan Pembangunan belum komprehensif	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi evaluasi kinerja e-monev	Diterapkannya aplikasi SIPD dan aplikasi e-sakip

Sumber: Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018-2023, diolah

3.5. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031

Pengembangan wilayah Kota Bima didasarkan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031. Terdapat 6 (enam) substansi dalam RTRW Kota Bima, yaitu 1) Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; 2) Rencana struktur ruang wilayah; 3) Rencana pola ruang wilayah; 4) Penetapan kawasan strategis; 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan 6) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Dari 6 (enam) substansi tersebut, substansi yang berimplikasi langsung terhadap pengembangan wilayah adalah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; dan penetapan kawasan strategis kota.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bima adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bima

No	Kebijakan	Strategi
1	penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya	mengembangkan pusat pelayanan yang sudah ada dan membentuk pusat pelayanan baru dalam rangka pemerataan pelayanan dan peningkatan pemanfaatan potensi wilayah kota
		mengembangkan fasilitas-fasilitas perkotaan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan, daya dukung, dan daya tampung kawasan
		mengembangkan sistem transportasi secara berjenjang yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota serta sistem jaringan prasarana kota lainnya
		mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung

No	Kebijakan	Strategi
2	pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah kota, wilayah provinsi, dan nasional	<p>meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota, termasuk didalamnya membangun jalan lingkaran luar Selatan dan lingkaran luar Utara (outer ring road) untuk mendistribusikan pergerakan eksternal</p> <p>mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antar wilayah dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat</p> <p>meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur evakuasi bencana dan transportasi massal yang berbasis moda jalan</p> <p>memelihara, merehabilitasi serta membangun sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah untuk mendukung fungsi kawasan dan fungsi pelayanan kota</p>
3	peningkatan kualitas pelayanan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan secara optimal	<p>mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah dan antar sistem pusat pelayanan</p> <p>mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu</p> <p>membuka jaringan-jaringan jalan baru sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antara pusat pelayanan kota dengan sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan serta antar kawasan di dalam wilayah kota dan antar wilayah</p> <p>meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir serta pembangunan kota tepian air (water front city)</p>

No	Kebijakan	Strategi
		<p>merestrukturisasi pola grid pada jalan utama kota sesuai dengan morfologi kota</p> <p>mengembangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan/atau persimpangan</p> <p>meningkatkan kualitas perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran pergerakan</p> <p>mengembangkan dan memantapkan tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran pada Pelabuhan Bima sebagai pelabuhan rakyat maupun pelabuhan bongkar muat dan meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarananya</p>
4	<p>pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana;</p>	<p>Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana meliputi meningkatkan kualitas dan jangkauan sarana dan prasarana kota</p>
5	<p>pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkesinambungan dan mendukung perkembangan wilayah kota</p>	<p>menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota</p> <p>memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota</p> <p>memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung sebagai bagian dari RTH</p> <p>menyediakan kawasan sempadan pantai sejauh 30 - 100 (tiga puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat</p> <p>memberikan perlindungan dan penyangga kanan-kiri sempadan sungai;</p> <p>melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung</p>

No	Kebijakan	Strategi
6	pencegahan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan ruang	<p>mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung;</p> <p>mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan perumahan penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung</p> <p>menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.</p>
7	penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota	<p>menerapkan ketentuan luas ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen</p> <p>merevitalisasi dan memantapkan kualitas ruang terbuka hijau yang ada;</p> <p>mengembangkan ruang terbuka hijau secara berjenjang mulai dari skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar kebutuhan ruang terbuka hijau</p> <p>mengembangkan ruang terbuka hijau berupa lahan konservasi dan resapan air, hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum, serta lapangan olahraga</p> <p>mempertahankan jalur-jalur hijau yang berada di sepanjang jaringan jalan</p>
8	perlindungan kawasan cagar budaya dan aktifitas yang memiliki nilai historis dan spiritual;	<p>melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah</p> <p>revitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya loka</p> <p>merehabilitasi kawasan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan;</p> <p>melarang kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan cagar budaya</p>
9	pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;	<p>menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana</p> <p>mengendalikan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;</p> <p>menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;</p> <p>mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu</p> <p>meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana</p> <p>memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan perumahan dan pusat-pusat</p>

No	Kebijakan	Strategi
		kegiatan ekonomi perkotaan
		mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan rawan bencana alam
10	pengembangan kawasan budidaya	pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, 16 kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan perikanan dan kawasan pertambangan.
11	pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	meningkatkan kualitas kawasan perumahan perkotaan
		menata kawasan padat dan/atau kumuh di wilayah perkotaan;
		mengembangkan sarana dan prasarana perumahan;
		mengatur dan menata kembali perumahan di sepanjang sempadan sungai
12	pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah kota	menata dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa;
		mengembangkan super blok sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan local
		memberikan ruang yang memadai untuk menampung aktifitas pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian maupun kawasan perdagangan skala besar
		menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan

Sumber: Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031

Rencana struktur ruang wilayah kota, terdiri atas: sistem jaringan prasarana kota dan sistem pusat pelayanan kota. Rencana sistem jaringan prasarana kota terdiri atas: a) sistem jaringan prasarana transportasi; b) sistem jaringan energi; c) sistem jaringan telekomunikasi; d) sistem jaringan sumber daya air; dan e) infrastruktur perkotaan. Infrastruktur perkotaan yang dikembangkan meliputi: i) sistem prasarana penyediaan air minum kota; ii) sistem pengelolaan air limbah kota; iii) sistem persampahan kota; iv) sistem drainase kota; v). penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan vi) penetapan jalur evakuasi bencana. Pada

dasarnya, sistem jaringan prasarana kota adalah untuk mendukung sistem pusat pelayanan kota.

Pada dasarnya, sistem jaringan prasarana kota akan sangat ditentukan oleh sistem pusat pelayanan kota. Sistem pusat pelayanan kota akan menentukan arah pengembangan wilayah kota. Sistem jaringan prasarana kota merupakan sistem jaringan untuk melayani sistem pusat pelayanan kota. Oleh karena itu, uraian tentang sistem pusat pelayanan kota sangat dibutuhkan karena menentukan arah pengembangan wilayah kota. Rencana sistem pusat pelayanan kota dijabarkan dalam 3 (tiga) hirarki Pusat Pelayanan Kota, terdiri atas: a) Pusat pelayanan kota (PPK); b) Sub pusat pelayanan kota; dan c) Pusat pelayanan lingkungan.

Pusat Pelayanan Kota meliputi kawasan perdagangan dan jasa di sekitar Lapangan Sera Suba sampai Kawasan Pantai Amahami dan Pelabuhan Laut. Sub pusat pelayanan kota meliputi kawasan sekitar Lewirato dan penatoi yang merupakan pusat pemerintahan serta Kawasan sekitar Lapangan Pahlawan sebagai sub pusat pelayanan kota. Sedangkan pusat pelayanan lingkungan meliputi Kelurahan Manggemaci, kelurahan Kodo, Kelurahan Kumbe, kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Sadia, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Kolo.

Tabel 3.6
Arahan Pemanfaatan Struktur Ruang Kota Bima

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMENFAATAN STRUKTUR RUANG				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2031
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM						
<i>A.PerwujudanPusatPelayanan</i>						
	Penataan kawasan pantai Amahami-Niu	Kelurahan Dara				
	Pembangunan Superblock Bina Baru	Kelurahan Dara				
	Pembangunan Universitas Negeri Bima	Kelurahan Sambinae				
	Pembangunan Rumah Sakit	Kelurahan Sambinae				
<i>B.Perwujudan SistemJaringanPrasaranaWilayah Kota</i>						
	Pembangunan jalan lingkar luarselatan dari Oi Ni'u - Nitu - Oi Fo'o - Kumbe	Kecamatan Mpunda				

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMENFAATAN STRUKTUR RUANG				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2031
	Pembangunan jalan tembus Panggi -	Kecamatan Mpunda				
	Pembangunan jalan tembus mulai dari Jalan Gatot Subroto -belakang SMAN 4 Kelurahan Penatoi	Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba				
	Mengembangkan terminal bongkar muat barang	Kecamatan Rasanae Barat				
	Normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Lampe, Sungai Padolo, Sungai Melayu, dan Sungai Jatibarubeserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase primer	Tersebar				
	Pengembangan kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan	Kelurahan Rontu, Kelurahan Penanae, Kelurahan Monggonao, Matakando dan Kelurahan				
	Pengembangan PDAM Kota	Kota Bima				
	Pemeliharaan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada	Kota Bima				
	Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan OiFo'o	Kecamatan Rasanae Timur				
	Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah melalui konsep 3R (<i>Reduce, Recycle, Reuse</i>)	Kota Bima				
	Mengembangkan jaringan air limbah komunal	Kota Bima				
	Menata jalur pejalan kaki sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan	Kota Bima				
	Menyediakan jalur pejalan kaki dikawasan sempa dan sungai	Kota Bima				
	Penyediaan saluran drainase pada kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan	Kota Bima				
	Pengembangan dan penataan system aliran Sungai Melayu, Sungai Padolo, Sungai Romo sebagai saluran utama	Kota Bima				
	Pengembangan system pengendalian banjir lintas Kota-Kabupaten dari hulu sampai hilir	Kota Bima				
B.10. Program Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana						

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMENFAATAN STRUKTUR RUANG				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2031
	Mengembangkan jalur-jalurevakuasi untuk menjauh lokasi-lokasi genangan bencana banjir	Kecamatan Rasanae Barat, kecamatan Mpunda.				
	Mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai	Kecamatan Rasanae Barat,				
	Mengembangkan jalur-jalurevakuasi bencana gempa bumi	Kota Bima				

Sumber: Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031.

Rencana Pola Ruang Kota, terdiri atas: a) Rencana pengembangan kawasan lindung; dan b) Rencana pengembangan kawasan budidaya. Kawasan Lindung kota terdiri atas: a) pengelolaan kawasan perlindungan setempat; b) pengelolaan kawasan cagar budaya; c) pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota; d) pengelolaan kawasan rawan bencana alam; dan e) pengelolaan kawasan lindung geologi. Rencana kawasan budidaya Kota terdiri atas: a) kawasan peruntukan pertanian; b) kawasan peruntukan perikanan; c) kawasan peruntukan perumahan; d) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; e) kawasan peruntukan perkantoran; f) kawasan peruntukan industri; g) kawasan peruntukan pariwisata; h) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; i) ruang evakuasi bencana; j) ruang terbuka non hijau; dan k) kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Tabel 3.7
Arahan Pemanfaatan Pola Ruang Kota Bima

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMENFAATAN POLA RUANG				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031
1	2	3	4	5	6	7
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM						
	Pengelolaan Kawasan Mata Air dilakukan keseluruh kawasan mata air yang berada pada radius minimum 25-100 meter dari titik mata air	Kota Bima				

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMENFAATAN POLA RUANG				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031
1	2	3	4	5	6	7
	Reboisasi Kawasan Rawan Bencana Alam di kawasan rawan longsor dan gelombang tsunami	Kota Bima				
	Pengembangan ruang terbuka hijau Kota Bima sebesar 20% dari luas Kota Bima	Kota Bima				
	Percepatan rehabilitasi kawasan hutan produksi	Kota Bima				
	Pengembangan kawasan perumahan	Kota Bima				
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok	Kecamatan Rasanae Barat				
	Penataan kawasan destinasi pariwisata pantai Niu-Lawata-Amahami-kolo	Kecamatan Rasanae Barat				
	Mempertahankan budaya lokal dan bangunan bersejarah	Kecamatan Rasanae Barat				
	Membangkitkan industri pariwisata	Kota Bima				
	Pengembangan kawasan sektor informal dilakukan di areal rekreasi sepanjang pantai Niu-Lawata	Kota Bima				
	Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan dilakukan pada Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre)					
	Pengembangan lahan pertanian untuk budidaya komoditas hortikultura	Kecamatan Rasanae Timur				
	Pengembangan pertanian lahan basah untuk peningkatan ketahanan pangan	Kecamatan Rasanae Timur				
	Membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis	Kecamatan Rasanae Timur				
	Peningkatan sarana prasarana di sekitar pelabuhan Bima	Kelurahan Tanjung				
	Revitalisasi Kawasan Istana Kesultanan Bima dan sekitarnya	Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, dan kelurahan Dara.				
	Penataan Kawasan lindung dan kawasan hutan produksi di Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota	Kota Bima				

Sumber: Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031

Berkaitan dengan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ini, maka Bappeda Litbang Kota berperan dalam memastikan bahwa indikasi program perencanaan tata ruang pada kawasan budidaya maupun kawasan lindung terinternalisasi dalam dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dengan demikian indikasi program pemanfaatan ruang benar-benar diwujudkan dalam membangun lingkungan perkotaan yang nyaman dan layak huni.

3.6. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan difokuskan pada alternative dan rekomendasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum tercapai yang mencakup pada 4 pilar yaitu pilar social, pilar ekonomi, pilr hukum dan tata kelola serta pilar lingkungan.

Dari 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 97 indikator pada Pilar Sosial, dan 20 indikator belum mencapai target terdapat 9 indikator belum mencapai target menjadi bagian indikator dalam pilar sosial yang menjadi pembahasan dan dianalisis berdasarkan data capaian sampai tahun terakhir sehingga dapat dirumuskan alternatif maupun rekomendasi dalam pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan kondisi serta kemampuan Kota Bima berdasarkan indikator-indikator tersebut.

Berdasarkan 5 Tujuam Pembangunan Berkelanjutan dalam pilar sosial belum mencapai target terdapat 9 indikator yaitu:

- Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
- Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
- Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
- Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
- Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

- Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
- Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
- Proporsi perempuan yang berada diposisi managerial.

Dari kondisi jasa ekosistem penyediaan pangan, penyediaan air dan jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup dimana kondisi ketiga jasa ekosistem tersebut berada pada kategori sangat rendah dan rendah yang dianalisis terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada pilar sosial, serta memperhatikan kondisi eksisting serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target maka dapat dirumuskan alternatif dan rekomendasi terhadap indikator indikator pada pilar sosial

Dalam pilar ekonomi terdapat 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 55 indikator, dimana terdapat 1 TPB yang tidak dilaksanakan dengan 2 indikator (TPB 7) dan 1 TPB tidak memiliki data dengan 6 indikator (TPB 10). Dan untuk indikator pada pilar ekonomi yang belum mencapai target berada pada TPB 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua), dengan 3 indikator dan pada TPB 9 (Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi) dengan 1 indikator, adapun indikator-indikator tersebut adalah:

- TPB 8
1. Laju pertumbuhan PDB per kapita.
 2. PDB per kapita.
 3. Persentase tenaga kerja formal.

- TPB 9
1. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.

Dilihat dari kondisi jasa ekosistem jenis penyedia pangan, penyedia air, tempat tinggal dan ruang hidup, serta jasa ekosistem jenis pengatur tata aliran air dan banjir yang keseluruhannya berada pada kategori Sangat rendah-rendah yang dianalisis terhadap indikator-indikator pada pilar ekonomi, serta memperhatikan dampak dan resiko lingkungan hidup, pemanfaatan sumber

daya alam, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, dapat dirumuskan alternatif dan rekomendasi terhadap indikator indikator pilar ekonomi.

Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola hanya terdapat 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 16 (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan) dengan 21 indikator dan 2 indikator yang belum mencapai target yaitu,

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
- Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan dilembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Dari analisis pada bab sebelumnya terhadap indikator tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar hukum dan tata kelola dengan memperhatikan kondisi jenis jasa ekosistem penyedia pangan serta jenis jasa ekosistem penyedia air dimana kedua jenis jasa ekosistem ini berada pada kategori sangat rendah-rendah, dan dengan mempertimbangkan kondisi terhadap lima muatan KLHS lainnya, maka dapat dirumuskan alternatif maupun rekomendasi pada indikator belum mencapai target dalam TPB pilar hukum dan tata kelola. Dari indikator capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum mencapai target sebanyak 22 indikator, dimana indikator belum mencapai target pada pilar lingkungan sebanyak 5 indikator dan satu indikator bukan menjadi kewenangan langsung Pemerintah Kota Bima, sehingga analisis dalam penyusunan alternatif dan rekomendasi dilakukan pada empat indikator yang menjadi kewenangan langsung Kota Bima.

3.7. Analisis Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di

dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bappeda Litbang menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Litbang Kota Bima, telaahan visi dan misi Walikota Bima, telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, telaahan terhadap RTRW dan KLHS, maka perumusan isu-isu strategis Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari identifikasi permasalahan eksisting (yang ada dan terjadi saat ini) dan yang (diprediksi) akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan daerah.
2. Perumusan isu strategis dipengaruhi oleh hasil evaluasi capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Bima yang menggambarkan bahwa masih ada masalah pembangunan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Sedangkan tugas utama Bappeda Litbang adalah membuat perencanaan pembangunan yang dapat mengatasi permasalahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan visi misi Kota Bima.

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang belum optimal menyebabkan tingkat capaian sasaran daerah, sasaran perangkat daerah dan sasaran program belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur dan fokus pada pencapaian sasaran strategis Kota Bima dalam RPJMD maupun sasaran strategis OPD
2	Sistem Data dan pengelolaan informasi pembangunan belum terbangun dengan baik	Membangun sistem data kinerja dan peningkatan kualitas data/informasi sebagai basis intervensi penanggulangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi
3	Pengendalian Perencanaan Pembangunan belum komprehensif	Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
4	Penelitian dan Pengembangan belum optimal	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian sebagai salah satu dasar penyusunan program/ kegiatan/sub kegiatan

Sumber: Hasil Analisa

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bima, Bappeda Litbang perlu menetapkan tujuan dan sasarannya. Tujuan dan sasaran Bappeda Litbang merupakan turunan dari Misi Ketiga Pemerintah Kota Bima yaitu Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Disamping itu, penetapan tujuan dan sasaran ini juga perlu dilakukan agar program dan kegiatan serta sumber daya yang dimiliki dapat terarah dan fokus pada hasil yang diinginkan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Bima digambarkan pada tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1.
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Inovasi dalam	Penhargaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase arah kebijakan 5 tahunan RPJPD yang ditindaklanjuti dalam RPJMD	Persen (%)	100	100	-	-	-

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Persentase sasaran strategis dan program prioritas RPJMD yang diakomodir dalam RKPD		100	100	-	-	-
			Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD		100	100	-	-	-
		Meningkatnya kinerja riset dan inovasi daerah	Angka	1	1	-	-	-	
		Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan pembangunan	Persen	60	60	-	-	-	
Setelah Perubahan									
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Angka	-	-	77,97	78,97	80,00

Sumber: Hasil Analisa

4.2. Definisi Operasional Indikator dan cara pengukuran kinerja Sasaran Strategis setelah Perubahan (2021-2023)

Tujuan jangka menengah Bappeda Litbang adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja indeks kualitas perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, selaras dan konsisten secara substantif antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas juga dimaknai sebagai perumusan program pembangunan harus benar-benar terukur dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian visi misi daerah maupun tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah juga dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut: *50% Capaian sasaran pemkot + 30% Sasaran perangkat daerah + 20% Capaian program perangkat daerah dikalikan 100*. Formulasi perhitungan target indikator kinerja ini didukung oleh penyajian data rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bima setiap tahunnya, kemudian rata-rata capaian indikator kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah dan rata-rata capaian indikator program seluruh perangkat daerah. Kondisi awal dari indeks perencanaan pembangunan pada tahun 2018-2020 belum ada karena belum diukur menggunakan indikator tersebut. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai ditahun 2022 adalah sebesar 80 poin.

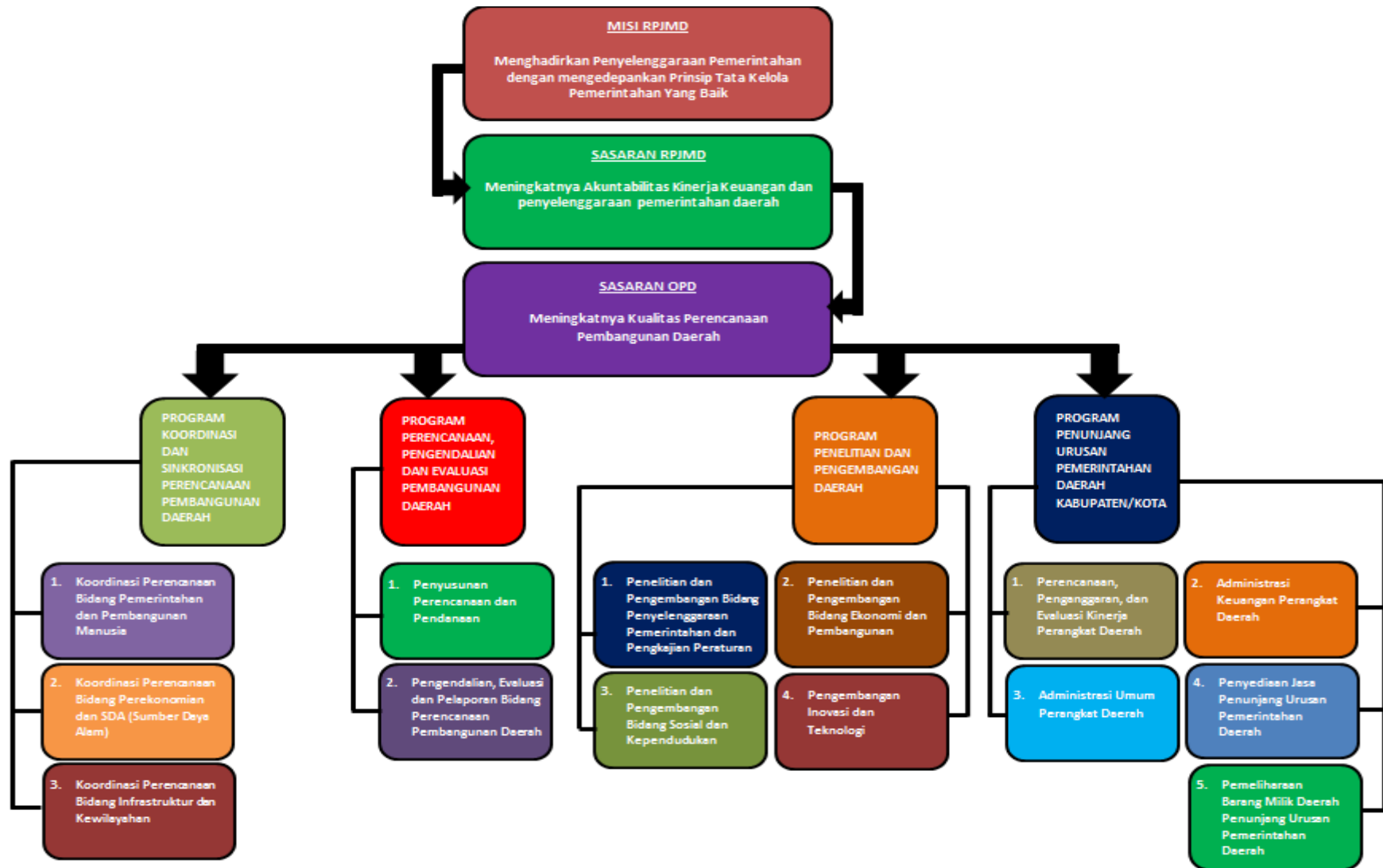
Penetapan target pada tahun 2021 sebagai baseline kinerja didasarkan pada kondisi rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD sebesar 97,00% dikalikan dengan indeks 0,5 sehingga menghasilkan nilai 48,50, kemudian rata-rata capaian sasaran Perangkat Daerah sebesar 82,84% dikalikan dengan indeks 0,3 menghasilkan angka 24,85, dan rata-rata indeks capaian program 4,62% sehingga diperoleh angka 77,97% sebagai baseline sekaligus target 2021.

Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan indeks sebesar 1,0 poin pada tahun 2022 dari tahun 2021, kemudian kenaikan target sebesar 1,03 poin pada tahun 2023. Adapun argumen yang menjadi latar belakang penentuan kenaikan tiap tahun sebesar 1,0 poin tahun 2022 dan 1,03 poin tahun 2023 yaitu ketepatan waktu penyajian data-data indikator makro yang tertuang dalam IKU Kota dari pihak eksternal seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian trend peningkatan kemampuan keuangan daerah yang relatif stagnan sehingga menghambat upaya-upaya untuk memacu peningkatan capaian kinerja secara signifikan baik pada tingkat program maupun pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan sasaran strategis Kota Bima.

Tabel 4.2.
Definisi Operasional Indikator dan cara Pengukuran Kinerja Bappeda Litbang

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	$(0,5(\text{capaian sasaran pemkot})+0,3(\text{sasaran perangkat daerah})+0,2 (\text{sasaran program daerah})\times 100$

Gambar 4.1
Kerangka Kerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018-2023



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Bima diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Bima.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kota Bima, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah kendali langsung tugas dan fungsi yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda Litbang Kota Bima.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peran yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kota Bima.

b. Faktor Eksternal:

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kota Bima.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kota Bima.

c. Penyusunan Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kota Bima. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda Litbang Kota Bima harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Litbang yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi, dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bima secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dijabarkan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengths-Opportunities strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

2. *Weaknesses-Opportunities strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal.
3. *Strengths-Threats strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal.
4. *Weaknesses-Threats strategy*, merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri.			
MISI : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Implementasi perencanaan pembangunan berbasis aplikasi	Mengembangkan aplikasi e-planning
			Mengembangkan pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
			Mengimplementasikan verifikasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
			Pendampingan penyusunan perencanaan kinerja setiap Perangkat Daerah
			Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan
		Optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Meningkatkan penerapan e-monev melalui aplikasi Simone
			Meningkatkan pendampingan pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja
		Mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah	Mengembangkan data base kelitbangan
			Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
			Melaksanakan lomba inovasi daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang tahun 2018–2023 akan menggambarkan Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun yang disertai dengan indikator kinerja, target akhir periode Renstra maupun target setiap tahun anggaran. Terdapat program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah yaitu:

NO	PROGRAM / KEGIATAN
I	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
A	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
B	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

NO		PROGRAM / KEGIATAN
		Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	B	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	C	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	III	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	A	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
	B	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	1	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
	C	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	1	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
	D	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
	2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2019 – 2023

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran		100%	1,356,460,253	1	715,665,650									Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun		370 surat	147,078,200	370 surat	139,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		5 rekening	53,400,000	5 rekening	39,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak		22 unit	14,300,000	22 unit	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai		1	49,015,000	1	51,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih		1 gedung	1,200,000	1 gedung	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan peralatan kantor yang siap pakai		1	16,500,000	1	14,505,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan alat tulis kantor yang tersedia		50 jenis	90,907,253	50 jenis	41,197,250	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan bahan dan dokumen yang release		90000 lembar	80,768,000	90000 lembar	31,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan pelayanan penerangan kantor		1	76,330,000	1	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis dan jumlah peralatan peralatan kantor baru		3 unit	52,769,000	3 unit	94,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kerjasama dengan media		21 media	63,200,000	21 media	25,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat yang tersedia		840 ktk	84,300,000	840 ktk	62,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		50 kl	626,692,800	50 kl	198,413,400	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		100%	279,299,950	1	82,635,000	-	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bima
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia		1 gedung	60,582,500	1 gedung	17,675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan gedung kantor yang layak pakai		1	54,317,450	1	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas yang layak pakai		1	164,400,000	1	49,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur		100%	48,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bima
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah seragam Kheki yang dibagikan		48 stel	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah seragam Tenun yang dibagikan		48 stel	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan		100%	370,173,000	1	168,745,100	-	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bima
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan kinerja dan keuangan triwulanan yang sesuai dengan ketentuan		2 dokumen	45,675,000	2 dokumen	40,576,100	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis yang sesuai dengan ketentuan		1 dokumen	23,335,000	1 dokumen	22,995,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan ketentuan		1 dokumen	12,785,000	1 dokumen	15,093,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DPA-SKPD/DPA-Perubahan		4 dokumen	198,078,000	4 dokumen	61,705,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Dokumen LAKIP, LPJ, dan LPPD		3 dokumen	90,300,000	3 dokumen	28,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Program pengembangan data/informasi	Cakupan Ketersediaan data dan informasi		30%	296,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima	Dokumen data dan informasi tata ruang wilayah		1 Dokumen	296,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan kerjasama pembangunan bidang kemiskinan dan keciptakaryaan		50%	154,766,250	-	187,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah		1 Dokumen	100,600,000	1 Dokumen	92,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	Laporan Review RPIJM		1 laporan	54,166,250	1 laporan	95,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase Program/ Kegiatan Rencana kegiatan Sektor Strategis dalam RKPD		20%	183,143,184	1	204,812,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dokumen BPS dan MPS		2 Dokumen	149,260,000	2 Dokumen	204,812,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	Dokumen perencanaan Kota Hijau		1 Dokumen	33,883,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Penyusunan KLHS RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD		-	-	1 Dokumen	186,730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Program perencanaan pembangunan daerah	100		100%	1,612,914,816	1	1,231,439,750	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Penyusunan rancangan RKPDP	Dokumen Rancangan RKPDP		1 dokumen	104,100,000	1 dokumen	97,610,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Berita Acara Hasil Musrenbang		4 dokumen	350,424,675	4 dokumen	58,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Penetapan RKPDP	Dokumen Penetapan RKPDP		1 dokumen	151,945,000	1 dokumen	182,911,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota		1 Dokumen	137,804,000	1 Dokumen	122,532,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen laporan realisasi Renja Per-Triwulan		4 Laporan	372,175,000	4 Laporan	314,614,250	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	Laporan koordinasi DBH-CHT		4 Laporan	191,863,780	4 Laporan	67,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			1 laporan	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		E - Planning	Dokumen laporan pengelolaan e-planning		4 Dokumen	77,719,000	4 Dokumen	275,674,500	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Penetapan RPJMD	Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023		1 Dokumen	127,008,400	1 Dokumen	112,318,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Rokok	Laporan Koordinasi Pajak Rokok Triwulan		4 Laporan	79,874,961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Program RENJA SKPD Bidang Ekonomi yang Selaras dengan RKPD		98%	156,916,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bima
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal		1 Dokumen	61,616,200	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah		1 Dokumen	95,300,000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase Program RENJA SKPD Bidang Sosial Budaya yang Selaras dengan RKPD		98%	912,415,194		636,126,000	-	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bima
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Dokumen pelaksanaan hasil Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya		4 Dokumen	479,823,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Laporan Pengendalian Kegiatan PKH		1 Laporan	87,746,000	1 Laporan	34,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	Laporan Koordinasi Advokasi Rumpun Kesra		1 Laporan	71,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Dokumen pelaksanaan hasil Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat		1 Dokumen	67,055,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi	Laporan Koordinasi aksi Pemberantasan Korupsi		1 Laporan	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Inventasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program P3K	Laporan Inventarisasi P3K		1 Laporan	39,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Integrasi Sinkronisasi dan sinergitas P3A	Laporan Sinkronisasi P3A		1 Laporan	39,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi	Dokumen reviu Percepatan Implementasi roadmap reformasi birokrasi		-	-	1 Dokumen	34,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Masyarakat	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Masyarakat		-	-	1 Dokumen	40,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Sub Bidang Pemerintah yang diverifikasi		-	-	24 Dokumen	166,596,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Manusia dan Masyarakat	Jumlah dokumen Sub Bidang Manusia dan Masyarakat yang diverifikasi		-	-	16 Dokumen	126,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Sub Bidang Sosial dan budaya yang diverifikasi		-	-	16 Dokumen	130,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Advokasi Percepatan Penanganan Stunting	Laporan Advokasi Penanganan Stunting		-	-	1 Laporan	37,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Advokasi Kota Layak Anak	Laporan Advokasi Kota Layak Anak		-	-	1 Laporan	61,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Koordinasi Balai Mediasi	Laporan Koordinasi Balai Mediasi		1 Laporan	69,680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Aksi HAM Daerah	Laporan Aksi HAM		1 Laporan	39,000,000	1 Laporan	5,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Pemsos	Kota Bima
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Program RENJA SKPD Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang Selaras dengan RKPD		95%	797,757,153	1	1,458,285,000	-	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bima
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	RENJA OPD yang Selaras dengan RKPD dan RENSTRA OPD		4 Laporan	509,957,153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Penyusunan Daya Dukung Lahan dan Air	Dokumen Daya Dukung Lahan dan Air		1 Dokumen	100,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Penyusunan KLHS RTRW	Dokumen KLHS RTRW		1 Dokumen	187,350,000	1 Dokumen	154,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Program KOTAKU	Laporan Koordinasi Program KOTAKU		-	-	1 Laporan	203,525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah dokumen Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan yang diverifikasi		-	-	24 dokumen	157,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Sub Bidang Ekonomi yang diasistensi dan disinkronisasi		-	-	12 Dokumen	775,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup yang diasistensi dan disinkronisasi		-	-	12 Dokumen	167,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diakomodir dalam RKPD		100%	229,582,000	1	63,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PP Ekonomi dan Infrastruktur	Kota Bima
		Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi TTG		60 peserta	229,582,000	60 peserta	63,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan inovasi daerah		30.00%	648,065,000	0	576,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Laporan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan		4 laporan	165,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Pelayanan Ijin Penelitian	Jumlah Ijin Penelitian yang Diterbitkan		500 Ijin	75,600,000	500 Ijin	61,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Penguatan Kelembagaan Kelitbangan Kota Bima	Tim Pengendali Mutu		1 Tim Pengendali Mutu	112,327,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Penyusunan Analisis Standar Belanja	Dokumen Analisis Standar Belanja		1 Dokumen	153,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Laporan Pembangunan Inovasi Daerah		1 Laporan	141,450,000	1 Laporan	368,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		Lomba Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovasi yang mengikuti gelar TTG		-	-	3 Inovasi	147,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang	Kota Bima
		PERENCANAAN			-	-	-	-	6,424,384,015	-	7,022,738,390	-	7,771,244,894	-	7,771,244,894	-		Kota Bima
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan		-	-	-	-	100%	4,356,870,715	100%	5,081,253,390	100%	5,268,386,094	100%	5,268,386,094	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		-	-	-	-	100%	99,353,426	BB	90,003,000	BB	128,389,000	BB	128,389,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	1 dokumen	4,780,000	2 dokumen	4,730,000	2 dokumen	4,730,000	1 dokumen	4,730,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD		-	-	-	-	2 dokumen	4,035,100	2 dokumen	4,035,100	2 dokumen	4,055,100	2 dokumen	4,055,100	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD Perubahan		-	-	-	-	2 dokumen	5,563,800	2 dokumen	5,550,000	2 dokumen	5,500,000	2 dokumen	5,500,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD		-	-	-	-	2 dokumen	3,510,000	2 dokumen	3,520,000	2 dokumen	3,490,000	2 dokumen	3,490,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD		-	-	-	-	2 dokumen	8,850,226	2 dokumen	8,150,000	2 dokumen	8,350,000	2 dokumen	8,350,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		-	-	-	-	4 Laporan	3,770,000	4 Laporan	3,820,000	4 Laporan	3,800,000	4 Laporan	3,800,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah		-	-	-	-	2 Laporan	68,844,300	2 Laporan	60,197,900	2 Laporan	98,463,900	2 Laporan	98,463,900	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	100%	3,551,097,089	100%	3,961,135,810	100%	3,988,652,194	100%	3,988,652,194	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		-	-	-	-	38 orang	3,416,767,089	35 orang	3,812,695,810	35 orang	3,822,137,194	35 orang	3,822,137,194	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		-	-	-	-	4 Dokumen	122,900,000	4 Dokumen	132,670,000	4 Dokumen	123,300,000	4 Dokumen	123,300,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		-	-	-	-	1 Laporan	4,230,000	1 Laporan	8,790,000	1 Laporan	13,140,000	1 Laporan	13,140,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		-	-	-	-	17 Laporan	2,470,000	17 Laporan	2,250,000	17 Laporan	19,250,000	17 Laporan	19,250,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi anggaran		-	-	-	-	1 dokumen	4,730,000	1 dokumen	4,730,000	1 dokumen	10,825,000	1 dokumen	10,825,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	100%	478,003,100	1	754,144,630	100%	869,263,700	1	869,263,700	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		-	-	-	-	1 paket	9,984,700	1 paket	9,318,700	1 paket	9,318,700	1 paket	9,318,700	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	-	-	12 bulan	27,910,500	12 bulan	71,771,850	12 bulan	318,560,200	12 bulan	318,560,200	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		-	-	-	-	12 paket	127,898,000	12 paket	146,849,000	12 paket	129,806,000	12 paket	129,806,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		-	-	-	-	12 paket	62,499,900	12 paket	102,237,900	12 paket	102,628,800	12 paket	102,628,800	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		-	-	-	-	20 dokumen	5,250,000	20 dokumen	5,250,000	20 dokumen	5,250,000	20 dokumen	5,250,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		-	-	-	-	24 Laporan	244,460,000	24 Laporan	423,967,180	24 Laporan	308,950,000	24 Laporan	308,950,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	100%	129,714,200	100%	128,297,450	100%	160,544,200	100%	160,544,200	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		-	-	-	-	4 laporan	29,400,000	4 laporan	41,300,000	4 laporan	69,000,000	4 laporan	69,000,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan		-	-	-	-	12 laporan	47,614,200	12 laporan	43,442,450	12 laporan	47,614,200	12 laporan	47,614,200	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		-	-	-	-	1 laporan	12,200,000	1 laporan	12,200,000	1 laporan	12,200,000	1 laporan	12,200,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		-	-	-	-	1 laporan	40,500,000	1 laporan	31,355,000	1 laporan	31,730,000	1 laporan	31,730,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	100%	98,702,900	100%	147,672,500	100%	121,537,000	100%	121,537,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		-	-	-	-	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2	80,313,000	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2	127,962,500	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2	60,177,000	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2	60,177,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		-	-	-	-	5 unit laptop dan 2 Pc	14,539,900	5 unit laptop dan 2 Pc	15,860,000	5 unit laptop dan 2 Pc	11,360,000	5 unit laptop dan 2 Pc	11,360,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		-	-	-	-	1 unit	3,850,000	1 unit	3,850,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	Sekretariat Bappeda	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia		-	-	-	-	77.97%	1,360,169,000	78.97%	1,245,729,500	80%	1,785,213,800	80%	1,785,213,800	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		-	-	-	-	77.97%	363,373,500	78.97%	371,380,000	80%	593,760,000	80%	593,760,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang pemerintahan yang disusun dan diverifikasi		-	-	-	-	4 Dokumen	51,278,000	4 Dokumen	51,278,000	4 Dokumen	51,278,000	4 Dokumen	51,278,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		-	-	-	-	8 Dokumen	33,814,000	8 OPD	107,672,000	8 OPD	135,303,000	8 OPD	135,303,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan		-	-	-	-	8 Dokumen	22,810,000	8 OPD	22,810,000	8 OPD	84,639,000	8 OPD	84,639,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi hasil harmonisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	1 Dokumen	39,453,500	1 Dokumen	39,453,500	1 Dokumen	39,453,500	1 Dokumen	39,453,500	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Pembangunan Manusia yang disusun dan diverifikasi		-	-	-	-	4 Dokumen	103,184,000	1 Dokumen	103,184,000	1 Dokumen	103,184,000	1 Dokumen	103,184,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		-	-	-	-	8 Dokumen	23,474,500	8 OPD	218,088,000	8 OPD	316,015,000	8 OPD	316,015,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		-	-	-	-	8 Dokumen	22,810,000	8 OPD	22,810,000	8 OPD	57,803,000	8 OPD	57,803,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi hasil harmonisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sub bidang Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	1 Dokumen	66,549,500	1 Dokumen	66,549,500	1 Dokumen	66,549,500	1 Dokumen	66,549,500	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		-	-	-	-	77.97%	413,302,800	78.97%	369,882,800	80%	580,260,600	80%	580,260,600	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Perekonomian yang disusun dan diverifikasi		-	-	-	-	1 Dokumen	133,582,500	1 Dokumen	133,582,500	1 Dokumen	133,582,500	1 Dokumen	133,582,500	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		-	-	-	-	5 Dokumen	56,084,400	5 OPD	175,916,900	5 OPD	259,294,900	5 OPD	259,294,900	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		-	-	-	-	5 Dokumen	29,132,800	5 OPD	21,172,800	5 OPD	21,172,800	5 OPD	21,172,800	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang SDA yang disusun dan diverifikasi		-	-	-	-	1 Dokumen	126,877,100	1 Dokumen	126,877,100	1 Dokumen	126,877,100	1 Dokumen	126,877,100	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		-	-	-	-	3 Dokumen	47,728,000	3 OPD	160,855,100	3 OPD	279,769,900	3 OPD	279,769,900	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		-	-	-	-	3 Dokumen	19,898,000	3 OPD	11,938,000	3 OPD	20,023,000	3 OPD	20,023,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan wilayah		-	-	-	-	77.97%	583,492,700	78.97%	504,466,700	80%	611,193,200	80%	611,193,200	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Infrastruktur yang disusun dan diverifikasi		-	-	-	-	1 Dokumen	297,559,000	1 Dokumen	297,559,000	1 Dokumen	297,559,000	1 Dokumen	297,559,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		-	-	-	-	5 Dokumen	49,776,500	5 OPD	308,473,500	5 OPD	256,185,420	5 OPD	256,185,420	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		-	-	-	-	5 Dokumen	21,395,400	5 OPD	21,395,400	5 OPD	69,201,400	5 OPD	69,201,400	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Kewilayahan yang disusun dan diverifikasi		-	-	-	-	1 Dokumen	49,782,500	1 Dokumen	49,782,500	1 Dokumen	49,782,500	1 Dokumen	49,782,500	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		-	-	-	-	5 Dokumen	143,959,500	5 OPD	153,410,000	5 OPD	262,098,580	5 OPD	262,098,580	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		-	-	-	-	5 Dokumen	21,019,800	5 OPD	21,187,800	5 OPD	23,707,800	5 OPD	23,707,800	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	77.97%	249,989,500	78.97%	255,445,000	80%	717,645,000	80%	717,645,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah		-	-	-	-	77.97%	99,889,000	78.97%	120,692,000	80%	582,892,000	80%	582,892,000	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Bima
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Kesepakatan dan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024		-	-	-	-	2 berita acara	35,582,700	2 berita acara	35,582,700	2 berita acara	35,582,700	2 berita acara	35,582,700	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Bima
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah		-	-	-	-	1 Dokumen	26,590,000	1 berita acara	31,847,000	1 berita acara	31,847,000	1 berita acara	31,847,000	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Bima
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota		-	-	-	-	1 Dokumen	30,724,000	1 berita acara	38,440,000	1 berita acara	212,885,500	1 berita acara	212,885,500	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Bima
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		-	-	-	-	4 Dokumen	42,575,000	2dokumen	50,405,000	4 Dokumen	302,576,800	4 Dokumen	302,576,800	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan		-	-	-	-	77.97%	249,989,500	78.97%	255,445,000	80.00%	717,645,000	80%	717,645,000	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Kota Bima
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya		-	-	-	-	77.97%	150,100,500	78.97%	134,753,000	80%	134,753,000	80%	134,753,000	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Bima
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan		-	-	-	-	2Dokumen	27,788,235	2 laporan	27,788,000	2 laporan	27,788,100	2 laporan	27,788,100	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Bima
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya		-	-	-	-	4Dokumen	33,105,500	1 laporan	25,905,000	1 laporan	25,904,900	4 Kerjasama	25,904,900	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Bima
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah		-	-	-	-	2Dokumen	89,206,765	4 laporan	81,060,000	4 laporan	81,060,000	2 laporan	81,060,000	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Bima
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang		-	-	-	-	30%	457,354,800	38.00%	440,310,500	38%	1,672,249,890	38%	1,672,249,890	Bidang Litbang	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya		-	-	-	-	30%	45,441,000	38.00%	112,500,000	38.00%	201,750,000	38%	201,750,000	Bidang Litbang	Kota Bima
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		-	-	-	-	1 Dokumen	45,441,000	1 dokumen	112,500,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	Bidang Litbang	Kota Bima
		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan						5 rekomendasi	51,750,000	5 rekomendasi	51,750,000	5 rekomendasi	51,750,000	5 rekomendasi	51,750,000		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya		-	-	-	-	30.00%	77,584,500	38.00%	77,584,500	38.00%	77,584,500	38%	77,584,500	Bidang Litbang	Kota Bima
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		-	-	-	-	1 dokumen	16,046,000	1 dokumen	16,046,000	1 dokumen	16,046,000	1 dokumen	16,046,000	Bidang Litbang	Kota Bima
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen penelitian dan pengendalian bidang partisipasi masyarakat yang dihasilkan		-	-	-	-	1 Dokumen	38,251,000	1 Dokumen	38,251,000	1 Dokumen	38,251,000	1 Dokumen	38,251,000	Bidang Litbang	Kota Bima

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					1 dokumen	23,287,500	1 dokumen	23,287,500	1 dokumen	23,287,500	1 dokumen	23,287,500	Bidang Litbang	Kota Bima	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya					30.00%	16,046,000	38.00%	16,046,000	38.00%	23,287,500	38%	23,287,500	Bidang Litbang	Kota Bima	
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					1 Dokumen	16,046,000	1 Dokumen	16,046,000	1 Dokumen	23,287,500	1 Dokumen	23,287,500	Bidang Litbang	Kota Bima	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi daerah					100%	373,662,800	100%	295,718,500	100%	1,434,184,890	100%	1,434,184,890	Bidang Litbang	Kota Bima	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi					10 Dokumen	205,963,400	1 dokumen	224,947,000	1 dokumen	1,234,230,975	1 dokumen	1,234,230,975	Bidang Litbang	Kota Bima	
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					1 Dokumen	30,900,000	1 dokumen	30,900,000	1 dokumen	82,800,000	1 dokumen	82,800,000	Bidang Litbang	Kota Bima	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif					3 Dokumen	126,539,400	3 laporan	70,771,500	3 laporan	106,893,915	3 laporan	106,893,915	Bidang Litbang	Kota Bima	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah hak kekayaan intelektual yang dihasilkan					1 Dokumen	10,260,000	1 dokumen	10,260,000	1 dokumen	10,260,000	1 dokumen	10,260,000	Bidang Litbang	Kota Bima	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini akan disajikan tolak ukur yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perencanaan pembangunan serta bidang urusan penelitian dan pengembangan sebagai landasan evaluasi kinerja Bappeda Litbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 7.1 berikut ini. .

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Indikator Tujuan dan Sasaran Sebelum Perubahan							
1.1	Persentase arah kebijakan 5 tahunan RPJPD yang ditindaklanjuti dalam RPJMD	87%	100%	100%	-	-	-	-
1.2	Persentase sasaran strategis dan program prioritas RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	77%	100%	100%	-	-	-	
1.3	Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD	92%	100%	100%	-	-	-	
1.4	Inovasi daerah yang masuk nominasi SINOVIK	0	1	1	-	-	-	
1.5	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan pembangunan	45%	60%	60%	-	-	-	
II	Indikator Tujuan dan Sasaran Setelah Perubahan							
	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	-			77,97%	78,97%	80,00%	80,00%
	Indikator Program							
2.1	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	-			77,97%	78,97%	80,00%	80,00%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
2.1.1	Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia	-	-	-	77,97%	78,97%	80,00%	80,00%
2.1.2	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	77,97%	78,97%	80,00%	80,00%
2.1.3	Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	-	-	-	77,97%	78,97%	80,00%	80,00%
2.2.	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	-	-	-	77,97%	78,97%	80,00%	80,00%
2.3.	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan		-	-	30%	38%	38,00%	38,00%

Sumber: Hasil Analisa

BAB VIII

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2018-2023 mendatang dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien. Pencapaian hasil pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan OPD ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa komitmen, profesionalisme, integritas dan kerja bersama dari seluruh aparatur Bappeda Litbang serta stakeholder terkait.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara, Amin.

Raba-Bima, Maret 2021
Kepala Badan,

Drs. H Muhammad Fakhrunraji, ME
NIP: 19680828 199203 1 010

BAB VIII
PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2018-2023 mendatang dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien. Pencapaian hasil pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan OPD ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa komitmen, profesionalisme, integritas dan kerja bersama dari seluruh aparatur Bappeda Litbang serta stakeholder terkait.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara, Amin.

Raba Bima, Maret 2021
Kepala Badan,



Drs. H Muhammad Fakhrunraji, ME
NIP: 19680828 199203 1 010